

UNIVERSITAS HASANUDDIN, 1956 - 1965



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	050209
Asal Dari	Fak Sastra
Banyaknya	2 (dua) ktp
Harga	Gratis
No. Inventaris	040205 - 136
No. Klas	17971

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Sastra
pada Jurusan Sejarah
Fakultas Sastra
Universitas Hasanuddin**

Oleh

AMRULLAH AMIR

9407126

MAKASSAR

2001

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS SAstra**

Sesuai dengan surat Penugasan Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin
Nomor : 1719/J04.10.1/P.P.27/2001, dengan ini kami nyatakan menerima dan menyetujui
Skripsi ini.

Makassar, 20 Agustus 2001

Konsultan I



Drs. Daud Limbugau, S.U.
NIP.130 190 505

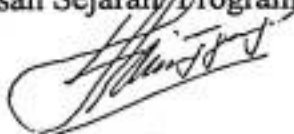
Konsultan II



Drs. Abd. Latief, M. Hum.
NIP. 131 876 812

Disetujui untuk diteruskan
Kepada Panitia Ujian Skripsi

Dekan
u.b. Ketua Jurusan Sejarah/Program Studi Sejarah



Dr. Edward L. Poelinggomang, M.A.
NIP. 131 430 495

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS SASTRA
JURUSAN SEJARAH**

Pada hari ini Selasa Tanggal 28 Agustus 2001, tim penguji menerima baik skripsi dengan judul:

Universitas Hasanuddin 1956 – 1965 .

Dalam rangka memenuhi syarat ujian akhir sarjana jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Makassar, 27 Agustus 2001

Panitia Ujian

Ketua	:	Prof. Dra. Marrang Paranoan, M.S.
Sekretaris	:	Dra. Dyah Kusmarini
Penguji I	:	DR. Edward L.Poelinggomang, M.A
Penguji II	:	Dra. Margriet Lappia Moka, M.S.
Konsultan I	:	Drs. Daud Limbugau, S.U.
Konsultan II	:	Drs. Abd. Latief, M.Hum.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
I 1. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
I 2. MASALAH DAN BATASAN MASALAH.....	5
I 3. METODOLOGI.....	8
I 4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	9
BAB II PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI SULAWESI SELATAN	
II 1. PENDIDIKAN TRADISIONAL.....	10
II 2. PENDIDIKAN ISLAM DAN PENDIDIKAN MODERN	18
BAB III PROSES BERDIRINYA UNIVERSITAS HASANUDDIN	
III.1. LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI DI MAKASSAR	
HINGGA 1965.....	28
III.2. SULTAN HASANUDDIN DAN UNIVERSITAS HASANUDDIN...	34
III.3. UNHAS LEPAS DARI UI.....	37

BAB IV SEPULUH TAHUN PERTAMA UNIVERSITAS HASANUDDIN 1956-1965

IV.1. STRUKTUR KELEMBAGAAN.....	39
IV.2. PERKEMBANGAN FAKULTAS DAN MAHASISWA.....	49
IV.3. UNHAS DALAM KANCAH POLITIK NASIONAL.....	54

BAB V KESIMPULAN.....62

DAFTAR PUSTAKA.....65

LAMPIRAN



B A B I

P E N D A H U L U A N

L1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pendidikan tinggi atau universitas di Indonesia saat ini tidak dapat dipahami tanpa melihat timbulnya sistem pendidikan yang bermula pada awal abad ke-20. Perkembangan pendidikan ini menimbulkan berbagai keadaan baru yang terjadi dalam masyarakat. Selain mengubah pola pikir juga menimbulkan suatu kelas baru terdidik yang mengembangkan kesadaran kemerdekaan dan persatuan nasional.

Sejak abad ke-17, Belanda telah mengadakan pendidikan dengan sistem Barat di Indonesia. Namun sistem pendidikan pada era itu berkaitan dengan agama Kristen.¹ Pada zaman itu pendidikan memang berkaitan dengan penyebaran agama. Kemudian pada abad ke-19 karena dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran rasional, pendidikan dipisahkan dengan kepentingan agama. Sistem pendidikan yang mulai dibangun di beberapa tempat di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Nusatenggara, Maluku, itu lebih menekankan hal-hal rasional yang berhubungan dengan kepentingan duniawi. Selain itu sistem sekolah yang mula-mula hanya diciptakan untuk masyarakat Eropa di beberapa kota besar di Indonesia, mulai dibuka untuk anak-anak priyayi. Jumlah murid yang berasal dari berbagai lapisan dan kelompok etnis makin bertambah karena dibukanya sekolah-sekolah umum oleh berbagai misi, zending dan golongan. Namun dibanding jumlah penduduk saat itu jumlah pelajar masih sangat kecil. Lulusan-lulusan sekolah ini memegang peranan penting dalam

¹ Lihat: R.Z. Leirissa, *Terwujudnya Suatu Gagasan: Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950*, 1985, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 24.

pergerakan nasional yang menjadi pendorong utama bagi perkembangan bangsa Indonesia dalam kemerdekaan dan pembangunan bangsa Indonesia.

Selain itu pendidikan yang diberikan oleh Belanda dalam masa-masa pemerintahan kolonialnya di Indonesia bukan bertujuan untuk mencerdaskan bangsa Indonesia dalam arti sebenarnya, melainkan untuk tujuan ekonomi Belanda. Politik Belanda dalam menjajah bangsa Indonesia dari sejak zaman VOC sampai zaman kelompok liberal berkuasa di negeri Belanda tidak banyak mengalami perubahan. Meski tidak dipungkiri banyak pula tokoh-tokoh asal Belanda yang berjasa bagi Indonesia. Para lulusan-lulusan sekolah ini memainkan peranan penting dalam pergerakan nasional yang menjadi pendorong utama dari perkembangan bangsa Indonesia.

Setelah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dan terus berproses dalam pembangunan bangsa, persoalan fundamental tentang peranan pendidikan semakin kompleks. Selain pengajaran ilmu pengetahuan, nilai-nilai serta perilaku yang sesuai dengan keadaan dunia yang terus berkembang dan berubah menjadi bagian dari pendidikan. Sehubungan dengan itu diperlukan gambaran yang jelas tentang masyarakat dan pendidikan yang diinginkan. Pandangan dan perspektif yang luas diperlukan dalam pengembangan pendidikan dari waktu ke waktu. Dalam tahapan pembangunan, bangsa Indonesia peranan kaum intelektual yang kreatif dan sangat penting.

Dalam rangka mengembangkan identitas nasional peranan kaum intelektual dalam memimpin masyarakat meneruskan kebudayaan tradisional sebagai akar dan juga mampu menginterpretasikan sumber-sumber kultural berdasarkan pandangan dan perspektif

yang baru. Ini membutuhkan kaum intelektual yang berkualitas tinggi yang terdidik dalam penerapan teknologi dan humanicra.

Menurut Sartono Kartodirdjo (1987:12), salah satu fungsi sistem pendidikan dalam dunia modern ialah peléstarian (pengawetan) nilai-nilai tradisional, dimana telah menjadi harapan umum bahwa Universitas berfungsi untuk menyampaikan ilmu pengetahuan pada satu pihak, dan pada pihak lain untuk turut membentuk pribadi dan nilai sesuai dengan identitas Indonesia.

Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hal yang sangat penting karena telah memasuki segala sendi kehidupan manusia sehari-hari dari pagi hingga malam. Di masa akan datang ilmu pengetahuan akan lebih mempengaruhi kehidupan manusia, serta merupakan alat menuju kemakmuran dan memfasilitasi kemampuan manusia.

Kemajuan suatu bangsa dan daerah sangat tergantung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam tingkatan pendidikan, perguruan tinggi atau universitas merupakan lembaga terdepan yang bertanggung jawab terhadap perkembangan tersebut. Karena pengolahan dan pendalaman berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan pada lembaga ini. Para lulusannya memiliki kemampuan yang lebih dan memiliki nilai di masyarakat.

Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia seperti diuraikan oleh Prof. T. Jakob (1996:12), yaitu terpusat di sumbu Jakarta-Bandung, dengan titik simpul di Serpong, Depok, Cibinong, Bogor dan Sumedang. Ilmuan berkumpul di sana dan

lembaga-lembaga baru didirikan sepanjang sumbu ini. Dekatnya suatu lembaga ilmiah dengan sumbu tersebut menjadi ukuran kualitasnya dalam masyarakat.

Untuk perkembangan di masa depan perguruan tinggi di luar Jawa berpotensi untuk berperan penting, jika usaha-usaha untuk itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Salah satu usaha yang telah lama dirintis dan akhirnya dapat terwujud dan berkembang adalah usaha masyarakat Indonesia Timur dan masyarakat Sulawesi Selatan mewujudkan sebuah perguruan tinggi yang dapat memenuhi keinginan masyarakat utamanya kaum muda. Dari keinginan untuk mengembangkan daerah, usaha mendirikan sebuah perguruan tinggi dapat terwujud dengan berdirinya Universitas Hasanuddin di Makassar pada tahun 1956. Berdirinya Universitas Hasanuddin merupakan suatu peristiwa bersejarah karena melalui berbagai proses perjuangan yang tidak sedikit mendapat kesulitan dan rintangan.

Melihat perkembangan yang terjadi mulai dari proses berdirinya dan perkembangan Universitas Hasanuddin, mendorong penulis untuk mengangkat perjalanan sejarah ini. Meski disadari bahwa tercerai-berainya data untuk mengangkat kajian ini, maka penulis memberi batasan-batasan yang lebih sempit.

Adapun faktor yang mendorong perhatian penulis untuk mengangkat perkembangan Universitas Hasanuddin khususnya proses berdirinya Universitas Hasanuddin dan membatasinya hingga tahun berdirinya. Alasan utama mengangkat periode ini adalah berbagai proses yang terjadi dalam berdirinya perguruan tinggi begitu banyak dijumpai rintangan dan halangan yang dipengaruhi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Selain itu melihat keadaan masyarakat Sulawesi Selatan yang memberi nomor



sekitan untuk pendidikan formal sebelum 1950 dan terus berproses hingga menjadikan pendidikan suatu yang wajib bagi setiap kalangan.

L2. Masalah dan Batasan Masalah

Universitas Hasanudin, disingkat dengan Unhas, sebagai lembaga pendidikan tinggi yang hadir di tengah masyarakat Indonesia Timur dan khususnya di Makassar, Sulawesi Selatan, membawa misi, kewajiban, harapan dan cita-cita luhur memajukan bangsa. Kehadiran Unhas mengalami proses yang diwarnai berbagai peristiwa yang berhubungan dengan sejarah bangsa Indonesia baik lokal maupun nasional.

Sebagai universitas terbesar di Indonesia Timur, dengan menoleh kebelakang pada fakta yang dihadirkan dari kajian mengenai Sulawesi Selatan diantaranya dalam Barbara S. Harvey (1989:66) serta Ichlasul Amal (1988: 24) mengenai pendidikan, bahwa hingga berakhirnya pemerintahan Belanda di wilayah ini sekitar tahun 1942, tingkat pendidikan masih begitu rendah. Dari catatan yang ada, sekitar seribu orang dari seluruh nusantara menempuh pendidikan tinggi di Jawa, tidak ada satu pun lulusan ini berasal dari etnis Bugis-Makassar, mayoritas penduduk di Sulawesi Selatan.

Dari sini penulis memulai kajian mengenai perkembangan pendidikan di Sulawesi Selatan sebelum 1950 dimana berbagai keadaan yang terdapat di dalam masyarakat. Selain keadaan negara yang belum pulih dari berbagai peristiwa yang berdampak pada berbagai sendi kehidupan dan masalah keamanan yang rawan, demikian pula pola fikir kaum bangsawan yang tidak terlalu merespon pendidikan. Hal ini disebabkan sikap

feodal yang berlaku di masyarakat dan jaminan yang diberikan oleh pemerintah Belanda sebelumnya.

Dengan timbulnya kesadaran dari kalangan muda dalam mengejar ketertinggalannya dalam bidang pendidikan dan sokongan para tokoh-tokoh nasionalis yang peduli pada pengaruh pendidikan pada perkembangan dan kemajuan bangsa, berbagai usaha untuk mendirikan perguruan tinggi di daerah ini terus dilakukan. Dipilihnya Makassar selain karena letaknya yang strategis yang mudah berhubungan dengan berbagai wilayah di nusantara, merupakan daerah yang memiliki administrasi yang lebih teratur, dan lebih metropolitan dibandingkan wilayah lainnya di Sulawesi. Perbauran etnis di Makassar lebih merata. Sedangkan Manado meski banyak memiliki tenaga terdidik namun sarana tidak memadai akibat banyaknya fasilitas yang rusak berat sebagai akibat pengeboman sekutu.² Setelah mengalami berbagai proses yang tak kenal lelah meski sempat timbul tenggelam akhirnya sebuah perguruan tinggi dapat berdiri, yang kita kenal sekarang dengan Universitas Hasanuddin, dengan kampus pertamanya di Baraya. Kampus Universitas Hasanuddin di Baraya ini diresmikan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Selanjutnya Universitas Hasanuddin terus mengalami perkembangan baik secara kualitas maupun kuantitas mahasiswa dan pengajar. Kemudian menjadi perhatian penulis berikutnya adalah perkembangan yang terjadi pada kemajuan pendidikan orang muda lokal yang terjadi di Universitas Hasanuddin. Seperti diketahui sebelumnya hingga 1950 pendidikan tinggi di daerah ini masih sangat rendah, namun setelah berdirinya

Universitas Hasanuddin perkembangan itu tampak nyata, meski pada mulanya pimpinan dan tenaga pengajar di dominasi oleh tokoh-tokoh dari Jawa, Minahasa, dan Hindia Belanda. Selanjutnya etnis lokal mulai mengambil peran karena mulai banyaknya tenaga terdidik lulusan perguruan tinggi bukan hanya dari Unhas saja, tapi juga dari berbagai perguruan tinggi di Jawa maupun beberapa dari luarnegeri yang kembali mengabdikan. Sebagian besar dari lulusan dari luar merupakan pindahan dari pendidikan tinggi yang pernah ada di Makassar, namun karena berbagai peristiwa yang terjadi di daerah ini, pendidikan tinggi tersebut mengalami kemunduran atau kebekuan. Para mahasiswa selanjutnya melanjutkan ke Jawa.

Dalam kajian ini penulis akan membatasi pada proses berdirinya Universitas Hasanuddin, dengan keyakinan telah banyak generasi baru yang melakukan proses akademika pada Universitas Hasanuddin ini tidak mengenal atau mengetahui para tokoh yang berjasa dan tujuan utama dari pendirian Universitas Hasanuddin yang menjadi kebanggaan daerah ini. Bersandar pada kesadaran akan banyaknya data mengenai Universitas Hasanuddin yang telah hilang dan tercerai-berai penulis lebih spesifik membatasi kajian ini yakni pada dua tahapan;

1. proses menuju berdirinya Universitas Hasanuddin
2. perkembangan dalam Universitas Hasanuddin dari 1956-1965

Alasan utama dari pemilihan hal di atas adalah begitu banyaknya rintangan dan halangan yang menyertai berdirinya Universitas Hasanuddin yang berhubungan dengan sejarah bangsa ini dan sejarah pendidikan tinggi di daerah Sulawesi Selatan. Adapun pembatasan

² Barbara S. Harvey, Pemberontakan Kahar Muzakkar, dari Tradisi ke DI/TII, 1989, Jakarta:

temporal yang mengambil jangka waktu 10 tahun karena periode tersebut yakni dari 1956 hingga 1965 adalah masa pengembangan awal dari Universitas Hasanuddin yang menjadi dasar dari perkembangan Universitas Hasanuddin di masa mendatang. Dilihat dalam rentang waktu tersebut terjadi perkembangan dalam pola pendidikan di daerah ini. pada masa berdirinya Universitas Hasanuddin tidak ada satu pun etnis lokal yang menduduki pimpinan dalam universitas hingga masa periode Arnold Mononutu yang memberi peran bagi etnis lokal yang telah menempuh pendidikan tinggi.

1.3. Metodologi

Dalam memahami objek kajian diperlukan metode untuk mencapai sasaran penelitian. Metode sejarah dalam Gottschalk (1975:32) ialah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan data yang di peroleh dengan menempuh proses yang disebut historiografi (penulisan sejarah). Disebutkan lebih rinci oleh Kuntowijoyo (1995:89) bahwa penelitian sejarah mempunyai lima tahap, yaitu :

1. pemilihan topik
2. pengumpulan sumber (penelusuran data dan dokumen serta wawancara)
3. verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber)
4. interpretasi: analisis dan sintesis,
5. penulisan.

Dari lima tahap tersebut diatas akan digunakan oleh penulis dalam pembahas kajian yang akan diangkat.

I.4. Sistematika Penulisan

Keseluruhan tulisan dalam kajian ini dibagi atas lima bab yang masing-masing berurutan sebagai berikut;

BAB I yang berisikan pendahuluan disusul dengan BAB II yang memberikan gambaran umum tentang keadaan pendidikan masyarakat di Sulawesi Selatan hingga sekitar tahun 1950. Pada BAB III digambarkan proses perkembangan pendidikan tinggi di Makassar yang menjadi cikal bakal dari Universitas Hasanuddin menuju berdirinya Universitas Hasanuddin dari 1947 hingga 1965. Sedangkan dalam BAB IV akan di analisa mengenai perkembangan yang menyertai Universitas Hasanuddin hingga 1965 utamanya berkaitan dengan struktur lembaga Unhas, perkembangan fakultas dan mahasiswa serta Unhas dalam kancah politik nasional hingga 1965. Pada BAB V sebagai Bab terakhir merupakan kesimpulan dari uraian sebelumnya.

B A B II

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI SULAWESI SELATAN

II.1. Pendidikan Tradisional

Penduduk lokal Sulawesi Selatan terdiri dari empat suku bangsa mayoritas yaitu: Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Kebudayaan Bugis meliputi daerah pada kabupaten : Bulukumba, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Sidenreng-Rappang (Sidrap), Pinrang, Polewali-Mamasa, Enrekang, Luwu, Pare-Pare, Barru, Pangkajene Kepulauan dan Maros. Sedangkan kebudayaan Makassar meliputi kabupaten : Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Selayar, Maros, dan Pangkajene. Maros dan Pangkajene merupakan daerah peralihan antara kedua kebudayaan tersebut. Orang Toraja mendiami wilayah dari kabupaten Tana-Toraja dan Mamasa, mereka biasa disebut Toraja Sa'dan. Sedangkan Mandar mendiami kabupaten Majene dan Mamuju.¹

Suku Bugis-Makassar memiliki jumlah yang terbesar dibanding suku lainnya yaitu Toraja dan Mandar. Dalam dua golongan terbesar ini lebih sering terjadi interaksi baik budaya maupun dalam perkawinan.

Masyarakat Sulawesi Selatan yang tradisional dan feodal adalah masyarakat dengan kaum bangsawan memiliki otoritas yang kuat dan memiliki ketaatan pada aturan hukum adat.

¹ Mattulada, dalam Prof. Dr. Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, cet. 11, 1993, hlm. 266.

Lapangan hidup utama masyarakat Sulawesi Selatan adalah: *Pallaonruna* (petani), *Pakkaja* (nelayan), dan *Passompe* (pelaut pedagang)². Para petani menanam padi dan palawija di sawah. Di berbagai tempat di pegunungan, di pedalaman dan tempat-tempat terpencil lainnya di Sulawesi Selatan banyak orang bercocok tanam dengan teknik perladangan. Nelayan Bugis dan Makassar telah menangkap ikan jauh ke laut dan terkenal sebagai bangsa pelaut yang telah mengembangkan kebudayaan maritim sejak beberapa abad yang lalu. *Passompe* kebanyakan menjadi saudagar yang berusaha di bidang eksport-import atau pelaut pedagang antar pulau.

Tabel 1
Kelompok Suku Bangsa dalam Komposisi Penduduk Indonesia
di Kota Praja Makassar- 1930

E t n i k	Jumlah Seluruhnya	% dari Jumlah Penduduk Pribumi (1930)
Bugis	15.799	24.14%
Makassar	37.389	57.13%
Mandar	412	63%
Selayar	1.808	2.76%
Toraja	377	58%
Buton	515	79%
Melayu	132	20%
Banjar	415	63%
Minahasa	844	1.29%
Ambon	1.460	2.23%
Jawa dan Madura	4.594	7.02%
Sunda	217	33%

² dikutip dari Barbara S. Harvey, Pemberontakan Kahar Muzakkar, dari Tradisi ke DITIL, 1989 hal. 82.

² Abu Hamid, Melestarikan Kebaharian Masyarakat Sulawesi –Selatan, dalam Romantika Pemikiran Fisipol Unhas dalam Masalah Sosial dan Politik, diterbitkan dalam rangka Lustrum VI Fisipol Unhas, Ujung Pandang, 1991, hlm. 207



5. *Sara'*, mengandung pranata-pranata dan hukum Islam yang melengkapkan keempat unsurnya menjadi lima.

Religi orang Bugis-Makassar dalam zaman pra-Islam yang digambarkan dalam *Sara Galigo* sebenarnya telah mengandung suatu kepercayaan kepada satu dewa yang tunggal yang di sebut dengan beberapa nama seperti: *Patoto-e*, *Dewata Seuwa-e*, dan *Turic a' rana*. Sebeliunya adalah kepercayaan lama di Tolotang di kabupaten Sidenreng-Rappang dan Amma-Towa di Kajang, Bulukumba.

Masuknya agama Islam ke Sulawesi Selatan pada permulaan abad ke-17, maka ajaran tauhid dalam Islam dapat dipahami oleh masyarakat yang telah percaya kepada dewa yang tunggal seperti termaktub dalam *La Galigo*. Proses ini dipercepat dengan kontak yang terus berlangsung dengan pedagang Melayu Islam yang sudah menetap di Makassar, atau pun sebaliknya kunjungan orang Bugis-Makassar ke negeri-negeri yang beragama Islam:

Selanjutnya hukum Islam dimasukkan ke dalam *Panngaddereng* dan menjadi *Sara'* sebagai suatu unsur pokok dari yang kemudian malahan menjiwai keseluruhannya. Unsur-unsur dari kepercayaan lama seperti pemujaan-pemujaan kepada nenek-moyang dan tempat keramat. Dalam konsep *Siri'* merupakan integrasi semua unsur-unsur pokok dari *Panngaderreng*. Semua ini meliputi banyak aspek dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan Bugis-Makassar. Menurut B.F. Matthes pengertian *Siri'* dengan rasa malu atau rasa kehormatannya tersinggung.

Hingga abad ke-20, terutama karena pengaruh gerakan-gerakan pemurnian ajaran Islam seperti gerakan Muhammadiyah, maka ada kecenderungan menganggap banyak tingkah dan *Panngaderreng* sebagai *Sara'*, tindakan yang bertentangan dengan Islam.

Selanjutnya mengatasi keadaan tersebut para tokoh masyarakat berusaha memulihkan kondisi masyarakat yang terus mengalami penderitaan dan tekanan yang tanpa henti. Gubernur Sulawesi periode 1956-1960, Andi Pangerang Petta Rani,³ menyadari bahwa kunci untuk memulihkan dan membangun daerah ini kembali selain merubah pola fikir masyarakat juga terletak pada pendidikan

Orang Bugis-Makassar lama dalam kehidupan sehari-harinya masih banyak terikat oleh sistem norma dan aturan-aturan adatnya yang di sakralkan yang disebut *Panggaderreng* (*Panggadakkang*-bahasa Makassar). Aturan adat itu terdiri atas lima unsur pokok ialah:

1. *Ade'* (*Ada'* dalam Makassar), adalah unsur yang terdiri dari *Ade' Akkalabinengengeng* atau norma mengenai hal ikhwal hukum-hukum perkawinan. Kedua, *Ade' Tana* atau norma-norma mengenai kehidupan bernegara dan pemerintahan negara.
2. *Bicara* adalah unsur bagian dari *Panggaderreng*, mengenai konsep-konsep yang bersangkutan paut dengan peradilan.
3. *Rampang'* yang berarti kias atau analogi yang berisikan ajaran-ajaran yang tidak dibakukan, atau perumpamaan-perumpamaan ideal dari suatu lapangan kehidupan serta berisi pandangan-pandangan yang dikeramatkan oleh masyarakat.
4. *Wari* adalah pengklasifikasian dari segala benda, peristiwa dan aktivitas masyarakat menurut kategorinya.

³ Prof. Dr. Hamid Abdullah, Andi Pangerang Petta Rani, Profil Pimpinan yang Manunggal dengan Rakyat, 1961, Jakarta: Gramedia, hlm 100

⁴ Bagian ini banyak mengambil dari Mattulada dalam Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, cet. 14, 1958, Jakarta: Djambatan, hlm 277-280.

terjadi mengikuti pertumbuhan kehidupan pranata sosial dalam kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan.⁷

Hingga akhir abad kesembilanbelas, kelas-kelas sosial masih mempertimbangkan status seseorang tidak hanya dalam penunjukan jabatan, melainkan juga pengabsahan kelas sosial melalui perkawinan.⁸ Kedudukan sosial seseorang ditetapkan oleh siapa yang dikawini atau oleh anak lelakinya. Namun kelas sosial ini tidak tertutup sama sekali. Seseorang wanita bisa menaikkan derajatnya lewat perkawinan, namun seorang laki-laki dapat meningkatkan statusnya hanya dengan mendapatkan kedudukan atau kekayaan dengan usahanya sendiri. Kompetensi timbul dalam masyarakat ini berhubungan dengan status, hal ini dicerminkan dalam karakterisasi kepribadian pria yang dikehendaki yaitu: bercita-cita tinggi, mempunyai daya saing, agresif, bangga, berani dan sadar status. Semua ini bagian dari siri' yang merupakan pedoman masyarakat untuk meningkatkan prestise yang berpengaruh bagi pada kedudukannya dan keluarganya sendiri.

Selanjutnya dijelaskan Mattulada mengutip Friedericy,⁹ pada zaman kekuasaan raja-raja ketika kerajaan Bugis Makassar masih memiliki kedaulatannya masing-masing, telah dijelaskan bahwa pelapisan masyarakat pada hakekatnya hanya ada dua saja; *anakarung* dan *to maradeka*. Penguasa dan rakyat yang dikuasai. Meski aturan adat itu ketat, masih terdapat keluwesan didalamnya. Dalam lapisan yang disebut Penguasa,¹⁰ tidak hanya terdiri dari golongan yang berasal dari anakarung saja. Dalam lapisan penguasa yang merupakan lapisan elite dari masyarakat, terdapat juga orang-orang yang

⁷ Dj. Hlm. 31

⁸ Dalam Barbara S. Harvey, Pemberontakan Kahar Muzakkar dari Tradisi ke D/VIII Hlm. 31.

⁹ Dalam Latou... hlm 26.

¹⁰ ibid.

berasal dari rakyat kebanyakan (To Maradeka) yang telah menunjukkan prestasi sosial.

Mereka itu adalah sebagai berikut:

1. **To Panrita**, yaitu cendekiawan, orang yang berilmu, pemimpin agama yang bekerja bagi kepentingan kemajuan rakyat banyak, baik berasal dari anakarung dan maradeka.
2. **To Sugi**, ialah orang-orang kaya, baik anakarung maupun to maradeka yang terpandang dalam masyarakat.
3. **To Warani**, ialah orang-orang pemberani yang membela kepentingan rakyat dan negara.
4. **To Sulesana**, adalah orang yang memiliki keahlian khusus, yang memiliki keahlian dalam usahanya memperbaiki masyarakat dan negara.¹¹

Keempatnya ditempatkan dalam lapisan elite masyarakat baik ia berasal dari anakarung maupun dari maradeka. Maka terjadilah mobilitas sosial yang vertikal sifatnya dari kalangan maradeka, dan mobilitas horizontal dikalangan anakarung.

Dengan dihapusnya tingkat *Ata'* secara resmi dalam masyarakat tahun 1906 oleh pemerintah Belanda, maka peranan anakarung semakin menjadi kurang penting. Namun mereka tetap berkaitan dengan pekerjaan utama mereka yang berkaitan dengan bidang pemerintahan. Selain itu anakarung masih menguasai tanah dan memegang monopoli atas kekuasaan. Dahulu golongan anakarung terpisah dengan masyarakat dengan penggunaan sebutan khusus seperti: Karaeng, Arung atau Aru, dan Datu¹² serta larangan kawin

¹¹ *Op.cit.*

¹² Dalam catatan Harvey (1989), hlm.26L: dijelaskan tidak ada tingkatan status dalam bahasa Bugis dan Makassar, adapun sisanya sampai sekarang adalah penggunaan sebutan "Andi" oleh banyak orang keturunan bangsawan Bugis-Makassar. Andi inisialnya dipakai pada daerah Bugis untuk memanggil wial:

terhadap putri bangsawan dengan pria lapisan bawahnya. Dalam perkembangan selanjutnya perbedaan antara lapisan anakarung dan maradeka dalam kehidupan masyarakat juga berkurang. Perkawinan antara kalangan anakarung dan maradeka, lambat laun meniadakan batas-batas pelapisan anakarung dan maradeka.

Menurut Mattulada (1998: 468) stratifikasi sosial masyarakat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan masa kini adalah hasil langsung dari perubahan-perubahan politik yang terjadi sejak tahun 1905-1906. Hasil dari ekspedisi terakhir Belanda 1906 membuat dua kerajaan utama di Sulawesi Selatan kehilangan kedaulatannya. Kerajaan-kerajaan yang sebelumnya dikuasai oleh kedua kerajaan ini menjadi daerah yang dikuasai dan diperintah langsung oleh Pemerintah Hindia-Belanda, sebagai daerah-daerah Gubernemen. Kedua kerajaan yaitu Bone dan Gowa pada tahun 1930 dijadikan daerah *Zelfbestuur* dengan dikembalikannya alat-alat kerajaan dan hak mengangkat rajanya.

Para bangsawan atau *anakarung* yang tidak ikut mengambil peranan dalam pemerintahan meski tetap memiliki pengaruh karena darahnya (*blood line*) didalam masyarakat, sebagian besar bergerak dibidang perniagaan, perusahaan atau pemilik tanah pertanian. Sedangkan yang ikut selain menjadi aparat pemerintahan resmi Belanda anak-anak mereka pun memiliki kesempatan yang lebih luas dalam memperoleh pendidikan yang diadakan pemerintah.

Lapisan yang mendapat pendidikan ini dikenal dengan sebutan *Binnenlands Bestuur Ambtenaren* (BB). Kelompok ini memperoleh pendidikan atau latihan dari sekolah-sekolah Pamong-Praja OSVLA atau CIBA, merupakan keturunan dari kalangan bangsawan. Meskipun memperoleh pendidikan modern namun mereka masih

bangsawan tingkat. Setelah kerajaaan dan kedudukan bangsawan dihapus pada masa kemerdekaan, banyak orang telah mendapat Asah untuk menemukan asal-usul bangsawan mereka.

Namun tradisi ini pada kalangan masyarakat tradisional yang terdapat di pelosok maupun penduduk kota pinggiran dimana masyarakatnya berpendidikan rendah masih sering dilakukan.

Stratifikasi Sosial sangat penting digunakan untuk mencari latar-belakang pandangan hidup, watak atau sifat-sifat mendasar dari suatu masyarakat, malah lebih jauh dapat mengungkapkan hubungan-hubungan kejadian dalam masyarakat yang menyangkut tingkah laku segenap kegiatan dalam masyarakat, termasuk kegiatan dan tingkah laku politiknya.³ Tentang pelapisan masyarakat Bugis-Makassar yang ditulis oleh Fredericy (1993)⁴ digambarkan keadaan lapisan masyarakat Sulawesi-Selatan sebelum daerah itu dikuasai oleh Pemerintah Hindia-Belanda dengan menggunakan banyak bahan mitologis.

Dalam masyarakat Sulawesi-Selatan, pelapisan tersebut terdiri atas 3 lapisan, yaitu:

1. **Anakarung** (lapisan Raja dan keluarganya, kaum bangsawan)
2. **Maradeka** (lapisan rakyat kebanyakan)
3. **Ata'** (hamba sahaya)

Menurut Friedericy, lapisan masyarakat tersebut pada hakekatnya ada dua lapisan saja: yaitu *anakarung* dan *to maradeka*, adapun *ata'* hanya merupakan lapisan sekunder yang

³ Mestulada, Latoa. Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, disertasi, tanpa tahun, hlm. 25.

⁴ Ibid.

mempertahankan status identitas masa lampau, dan selalu berusaha mencapai status yang lebih tinggi (Mattulada:1998: 469).

Hingga tahun 1940-an komposisi kaum elite yang merupakan warisan masa lampau menempati kedudukan baru dalam masyarakat, yang mengutip dari Mattulada terdiri dari:

1. Kaum *Arakarang* yang setia kepada Belanda dan kaum *Ambtenaar* BB, sebagai kelas utama.
2. Kaum *Ambtenaar* *Gubernemen* lainnya, yaitu orang-orang cendekiawan yang mendapat pendidikan formil dari kalangan ulama Islam/Adat serta para pemimpin Pergerakan Sosial, dikenal sebagai elite kelas menengah.
3. Kaum hartawan, pedagang, dan pengusaha lainnya sebagai kelas dasar.

Namun seiring berjalannya Perang Dunia II dengan kemenangan Jepang atas sekutu termasuk Belanda, di mana rakyat menyaksikan bagaimana keadaan tawanan-tawanan Belanda yang dikalahkan Jepang tak lebih dari *ata'* karena kehingan semua kekuasaan dan pengaruhnya. Tanpa kekuasaan semuanya berakhir. Ini semua membuat rakyat tidak sudi lagi menerima kembali kekuasaan Belanda. Ini juga menyebabkan ketaatan masyarakat terhadap bangsawan yang terbentuk oleh Belanda menjadi luntur. Selanjutnya menimbulkan kesadaran nasional mendukung kemerdekaan Indonesia.

II.2. Pendidikan Islam dan Pendidikan Modern

Pendidikan tradisional masyarakat Sulawesi Selatan, utamanya di desa-desa, sejak dahulu diselenggarakan oleh guru-guru mengaji pada pondok-pondok pengajian Al-Quran, serta sudah merupakan tempat yang penting dalam masyarakat.

Ketika pemerintah Belanda mulai mendirikan sekolah-sekolah untuk pribumi, sekolah pertama adalah Sekolah raja tahun 1910, para bangsawan tidak menunjukkan respon mereka. Hal ini merupakan refleksi dari fakta bahwa Belanda memberikan jaminan kepada raja akan kesetiaan mereka pada pemerintah, dan adanya kesadaran dari para bangsawan apabila mereka mengadopsi nilai-nilai Barat melalui sistem pendidikan akan menciptakan jurang sosial antara raja dan bangsawan dengan rakyatnya, yang mengakibatkan melenuhnya otoritas mereka sebagai penguasa. Seperti diketahui dalam masyarakat sistem pendidikan tradisional yang berwarna Islam mendominasi kehidupan masyarakat secara mendalam dan luas. Selain itu ada anggapan masyarakat dengan memasuki sekolah pemerintah Belanda berarti mereka akan di-Belanda-kan, dan menjadi suruhan Belanda. Sekolah-sekolah agama ini diasuh oleh yayasan pendidikan swasta dari organisasi seperti Muhammadiyah, Darudda'wah Al Irsjad, Assa'diah, Misbah, Jamiatul Islamiah, perguruan Islam dan Pendidikan Islam.¹³ Demikian pula pandangan mereka terhadap pemerintahan Belanda. Sebab lain yang didasarkan oleh laporan-laporan para pejabat Belanda mengungkapkan bahwa kekurangan minat dikalangan orang-orang Bugis-Makassar untuk menyekolahkan anak disebabkan oleh keengganan untuk memisahkan anak dari keluarga. Didasarkan kurangnya respon dari kaum bangsawan ini diikuti pula oleh rakyatnya. Menjelang berakhirnya kekuasaan Belanda tahun 1942, tingkat pendidikan di daerah ini masih rendah. Sebagai perbandingan dari sekitar seribu orang Indonesia di seluruh nusantara yang menempuh pendidikan tinggi di universitas di Jawa, tidak ada satu pun yang berasal dari etnik Bugis-Makassar.

Dalam Barbara S. Harvey (1989), berdasarkan sensus 1920 hanya 3,7% dari jumlah penduduk yang memiliki kemampuan membaca dan menulis di Sulawesi Selatan

¹³ M. M. M. M. dalam Koentjaraningrat (ed.), hlm. 282

dan Tenggara. Namun berdasarkan kenyataan bahwa lebih dari separuh dan dua pertiga dari orang yang dapat membaca dan menulis pada sensus 1930 tidak pernah bersekolah. Hal ini menunjukkan adanya pendidikan non formal. Di kota Makassar berdasar sensus 1930, 43 % penduduk pribumi ditemukan bisa membaca dan menulis Belanda. Ini dikarenakan Makassar adalah tempat utama pemerintahan dan kantor pusat untuk kegiatan perdagangan dan ekonomi Belanda, disamping pusat pendidikan bahasa Belanda. Bagi kaum laki-laki muda, bersekolah semakin menjadi sarana untuk memperoleh kemampuan menulis dan membaca, meski pada sensus 1930 dari 87% lelaki belum dewasa yang tahu membaca dan menulis hanya 35 % pernah bersekolah.

Akibat dari rendahnya pendidikan formal modern, tidak banyak kelompok nasionalis yang timbul pada masyarakat Sulawesi Selatan, karena terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan dan hanya sedikit waktu bagi kelompok intelegensia untuk berkembang dalam periode kolonial tersebut. Misi Kristen tidak mendapat banyak tempat berpijak di daerah Bugis-Makassar yang kuat Islam-nya, sehingga sekolah-sekolah misi pun tidak berkembang seperti di Minahasa. Karena tidak banyak pemuda Sulawesi Selatan yang masuk sekolah menengah di Jawa, maka tidak banyak pula yang mempunyai hubungan dengan pelajar lain di nusantara. Demikian pula kontra-elit Islam tak ada, karena baik hierarki administrasi Islam maupun gerakan modernis Muhammadiyah kedua-duanya dipimpin oleh kaum bangsawan. Meski sekolah-sekolah Muhammadiyah menyebar sampai pelosok, dan beberapa pemuda Islam bersekolah di Jawa, namun jumlahnya tidak banyak.¹⁴

¹⁴ Barbara S. Harvey, *Sulawesi Selatan: Boneka dan Patriot*, dalam Audrey R. Kahin (ed.), *Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan*, Jakarta: Grafiti Press, 1990, hlm. 214.



Sebagai perbandingan tingkat pendidikan di Minahasa pada zaman kolonial pengaruh Belanda cukup kuat di daerah itu. Berdasarkan sensus 1930, lebih 90 % penduduknya beragama Kristen dan banyak orang Minahasa bekerja dalam dinas-dinas sipil dan militer kolonial. Dalam karesidenan Manado perbandingan tertinggi antara pelajar dan penduduk, dan angka melek huruf paling tinggi di Hindia-Belanda, karena di sana terdapat jumlah besar sekolah swasta, baik dalam bahasa daerah maupun Belanda, yang sebagian besar dikelola oleh misi Kristen.¹⁵

Di Minahasa, seperti dijelaskan oleh Harvey, tidak pernah berkembang bangsawan daerah yang kuat, distrik ini dibolehkan mempunyai sebuah dewan daerah pada tahun 1919, salah satu dari dewan-dewan bukan kota praja yang pertama, yang disetujui pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hal ini mewariskan keadaan politik yang lebih mencerminkan demokrasi kolonial daripada demokrasi tradisional. Sedangkan di Sulawesi Selatan, kecuali kota Makassar, sangat sedikit tersentuh pengaruh Belanda. Perbandingan antara jumlah pelajar dan jumlah penduduk di Sulawesi Selatan pada tahun 1936-1937 adalah 1 dari 55, dibandingkan Manado 1 dari 19 penduduk.¹⁶ Jumlah orang melek huruf di Makassar adalah yang terendah di Hindia Belanda.

Bangsawan di Sulawesi Selatan mempertahankan banyak martabat tradisional mereka, pengaruh dan kekayaannya, di wilayah baik yang langsung maupun tidak langsung di bawah kolonial Belanda. Telah dijelaskan sebelumnya, dengan adanya perjanjian antara para raja dan pemerintahan Belanda, para bangsawan mendapat imbalan dibolehkan menjalankan fungsi tradisional mereka terutama yang menyangkut hukum adat dan agama.

¹⁵ Barbara S. Harvey, *Pemberontakan Setengah Hati*, Jakarta, Graffiti Pers, 1989, hlm. 33.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

Tabel 2

Pendidikan di Sulawesi 1928

	Sekolah Umum			Sekolah Swasta				Total
	Jumlah Gairah	Jumlah Lokal	Jumlah Indonesia	Jumlah Sekolah	Jumlah Eropa	Jumlah Indonesia	Jumlah AsiaAsing	
Karesidenan								
Manado								
Pendid Dasar	545		36,050	546	1	36,323		76,353
Eks Daerah								
Pendid Dasar	144	388	1,626	306	105	3,081	620	6,655
Eks Belanda								
Sulawesi & Daerah Taliunan								
Pendid Dasar	515		51,141	51		5,246		56,377
Eks Daerah								
Pendid Dasar	144	341	1,491	34	115	82		2,609
Eks Belanda								

Keterangan:

a=10 di Manado/Minahasa, 4 di Gorontalo

b=20 di Minahasa, 2 di Gorontalo, 2 di Sangihe-Talaud, 1 di Bolaang Mongondow, 1 di Poso, 3 tidak diketahui

c=9 di Makassar

d= semua di Makassar

Sumber: dikutip dari Barbara S Harvey, *Pernesta, Pemberontakan Setengah Hati*, Grafitipera, 1989, hlm. 34.

Demikian pula dengan dengan fungsi kauru bangsawan seperti perpajakan dan pengerahan tenaga kerja, diserahkan kepada kepala desa atau para birokrat kolonial. Beberapa orang Bugis dan Makassar, baik bangsawan maupun orang biasa mendapat pendidikan yang diperlukan guna memasuki dinas pemerintahan sipil. Dinas ini merupakan alat kekuasaan kolonial yang sesungguhnya dan didominasi oleh orang-orang Manado dan Jawa yang lebih berpendidikan.¹⁷

11.5. Persoalan Keamanan

Masalah yang menjadi penghambat perkembangan pendidikan di Sulawesi Selatan yaitu masalah keamanan yang baru pulih tahun 1965. Pemberontakan Kahar

¹⁷ Op.cit. hlm. 210

Muzakkar dan gerakan-gerakan para *warlord* di pedalaman menimbulkan gejolak yang meresahkan dalam kehidupan masyarakat. Semua ini berpengaruh dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, sosial dan ekonomi terganggu. Anak-anak muda lebih senang menjadi tentara dibandingkan melanjutkan sekolah. Selain karena bangga dapat menjadi anggota dari pimpinan mereka, biasanya para pimpinan tentara atau *warlord* tersebut adalah orang yang dihormati di daerah mereka, juga dikarena kemudahan dan fasilitas yang mereka peroleh dengan menjadi tentara.¹⁵

Persaingan-persaingan militer yang mencakup berbagai aspek namun terutama dalam bidang ekonomi dan perluasan otonomi setempat merupakan inti gerakan di Sulawesi. Persaingan ini mencetuskan tantangan daerah terhadap wewenang pusat.¹⁶ Kehadiran semua kesatuan militer di Sulawesi Selatan telah membuat persoalan komando dan disiplin menjadi sangat kacau. Hal ini membuat keadaan daerah ini semakin rawan yang akhirnya mempengaruhi semua sendi kehidupan masyarakat daerah ini.

Selama revolusi nasional Indonesia tahun 1945-1949 Sulawesi Selatan menonjol karena menjadi tempat perlawanan terhadap kembalinya pemerintahan Belanda yang paling sengit di luar Republik dan bersama dengan itu menjadi pusat Negara Indonesia Timur (NIT), sebuah negara yang paling berkembang di antara negara-negara federal yang di buat oleh Belanda. Untuk menegakkan pemerintahan NIT di Makassar, Belanda melancarkan pasifikasi militer dari Desember 1946 sampai Maret 1947, dilakukan secara sistematis oleh Kapten Westerling, mengakhiri secara efektif perlawanan bersenjata yang

¹⁵ Dari fakta tersebut, sebagian besar tokoh dari SulSel yang menempuh pendidikan di Jawa sebelum tahun 1946 memasuki dunia militer diantaranya: Kahar Muzakkar, Yusuf Amir, A. Mattalatta, Saleh Lahade, Andi Rifa'i, dan Andi Pangerang Pettarani (p-en). masalah ini pun telah dibahas secara mendetail oleh Harvey (1969) tentang gerakan Kahar Muzakkar.

¹⁶ Mengenai keadaan ini dijelaskan lebih jauh dalam kedua buku Barbara S. Harvey, *Permesta, Pemberontakan.....* (1969) dan *Pemberontakan Kahar Muzakkar.....* (1969)

utama di Sulawesi Selatan. Masa ini merupakan bagian terkejam dan membawa penderitaan bagi kebanyakan penduduk Sulawesi Selatan selama masa revolusi.

Revolusi nasional di Sulawesi Selatan punya dua aspek yang berbeda yang oleh Harvey (dalam Audrey R. Kahin, ed., 1990:229) digolongkan sebagai boneka dan patriot. Perbedaan itu bersifat kronologis; kebanyakan rakyat di Sulawesi mulanya menolak kembalinya kekuasaan Belanda, hanya karena karena situasi saat itu mustahil dilakukan beberapa diantaranya setuju bekerjasama dengan Belanda. Sebagian lagi karena geografis, karena Belanda menguasai Makassar relatif cepat dan menempatkan markas besar pemerintahan dan militernya untuk Indonesia Timur di Makassar sedangkan di pedalaman kaum gerilyawan bergerak terus setidaknya secara sporadis. Namun perbedaan boneka-patriot tidak dilihat secara dikotomi⁴⁰. Namun perbedaan ini antara pengalaman revolusi di Makassar dan di pedalaman banyak mendasari pergolakan yang melanda Sulawesi Selatan selama pemberontakan Kahar Muzakkar dari tahun 1950 sampai 1965.

Selain itu pembagian di Sulawesi Selatan meninggalkan sisa-sisa kebencian dan balas dendam. Sejumlah penguasa dan pejabat pro-Belanda dicopot dari jabatannya, beberapa di antaranya di bunuh, setelah pemulihan kedaulatan dan pembubaran NIT. Tahun-tahun penuh huru-hara di Sulawesi Selatan pada tahun 1950 sampai 1965, memberi banyak peluang untuk menyelesaikan hutang kehormatan atau balas dendam.

Munculnya Makassar sebagai ibukota NIT punya dua pengaruh terhadap kota ini yaitu: pertama, NIT mencakup semua daerah Indonesia Timur, maka para tokoh pejabat dan anggota parlemen datang dari seluruh bagian timur Indonesia. Ini menyebabkan

⁴⁰ Lebih jauh mengenai pembagian antara Boneka dan patriot dan berbagai peristiwa di dalamnya lihat Barbara H. Harvey dalam Audrey R. Kahin ed. (1991).

Makassar menjadi kota kosmopolitan dan multietnis. Selain itu bagi orang Bugis-Makassar, kota ini menjadi kota kenangan sebagai simbol boneka Belanda selama masa revolusi di Sulawesi Selatan tahun 1945-1949.

Berbagai peristiwa yang terjadi di Sulawesi Selatan yang membawa pengaruh bagi kehidupan masyarakat di berbagai bidang utamanya di bidang keamanan dan ekonomi yang mempengaruhi pula masalah pendidikan masyarakat. Dalam usaha mengatasi keadaan tersebut hal utama yang perlu dilakukan adalah mengendalikan keamanan.

Peristiwa selanjutnya yang membawa pengaruh besar di Sulawesi adalah hubungan dengan pusat. Berbagai ketidakpuasan terhadap pembagian hasil daerah yang dilakukan serta sikap pusat kepada keputusan mengenai para tentara yang berpendidikan rendah. Ketidapuasan kalangan sipil dan militer telah terbentuk secara intensif di seluruh Indonesia sejak tahun 1955. Krisis ini kemudian meletus tahun 1957-1958. Di Sulawesi terkenal dengan Permesta. Peristiwa ini menyeret banyak tokoh Sulawesi di Minahasa dan Makassar.

Selama limabelas tahun pertama berdirinya Indonesia pasca-kolonialisme, Indonesia dihadapkan sejumlah pemberontakan yang menguji ketahanan negara ini. Dua pemberontakan yang paling penting yang dihadapi pemerintah yang terjadi di Sulawesi. Pemberontakan Kahar Muzakkar yang secara formal berkaitan dengan pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat dan Aceh pada masa itu yang menjadikan Sulawesi Selatan dan Tenggara terus bergolak dari 1950 hingga 1965. Kemudian Permesta yang berkaitan dengan pergolakan daerah tahun 1956 sampai 1961 yang dimulai di Sulawesi Selatan melebar ke Sumatera Selatan, meski akhirnya dipertujukan

di Sulawesi Utara. Sekali lagi keadaan tersebut membawa masyarakat kedalam situasi yang parah.

Pemerintah kemudian menanggapi keadaan tersebut dengan melakukan operasi penumpasan. Ini dimaksudkan agar kondisi kehidupan rakyat yang memprihatinkan tidak berlarut-larut dan pembangunan dapat dilaksanakan. Selanjutnya mengatasi keadaan tersebut para tokoh masyarakat berusaha memulihkan kondisi masyarakat yang terus mengalami penderitaan dan tekanan yang tanpa henti. Gubernur Sulawesi periode 1956-1960, Andi Pangerang Petta Rani,²¹ menyadari bahwa kunci untuk memulihkan dan membangun daerah ini kembali selain merubah pola fikir masyarakat juga terletak pada pendidikan.

Untuk itu pendidikan mendapat prioritas pada masa kepemimpinan beliau. Pendirian sekolah-sekolah lanjutan di hampir seluruh kawasan Sulawesi Selatan dengan bantuan dari berbagai pihak. Kesulitan guru dipecahkan dengan bekerjasama dengan instansi terkait yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui program Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM) dengan mendatangkan guru dari Jawa dengan memberi mereka fasilitas yang dibutuhkan. Melihat data pada tabel 3, dari waktu ke waktu jumlah sekolah semakin banyak demikian pelajar bertambah jumlahnya meski jumlah penduduk dibandingkan jumlah pelajar masih belum sebanding, hal ini disebabkan pula oleh prasarana yang utamanya jalan dan transportasi sehingga belum menyentuh sampai jauh ke daerah.

²¹ Prof. Dr. Hamid Abdullah, *Andi Pangerang Petta Rani, Profil Finginan yang Manunggal dengan Rakyat*, 1991, Jakarta: Gramedia, hlm 100

Tabel 3
Jumlah Sekolah-sekolah Umum dan Kejuruan 1950-1969

No.	Jenis Sekolah	s/d 1950	s/d 1960	s/d 1969	Jumlah Murid 1969
1.	Taman Kanak-Kanak	1	67	115	6.854
2.	Sekolah Dasar	186	2808	4211	653.551
3.	SMP	7	59	188	53.200
4.	SMEP	4	19	45	8.452
5.	SMA	2	18	64	13.900
6.	SMEA	1	3	14	8.452
7.	SGB	2	29	-	-
8.	SGA/PGA	1	1	24	8.520
9.	Kursus Guru A	-	4	12	1.350
10.	SGTK	-	1	-	-
11.	SGKP	1	-	-	-
12.	SKP	1	12	15	1.052
13.	ST	1	11	39	7.997
14.	STM	-	3	7	3.492
15.	SKKP	-	8	16	1.320
16.	PGSLP	-	1	1	1.300
17.	KDP	1	2	2	276
18.	KPA	-	1	1	281
19.	KPPA	-	1	2	295
20.	SHD	1	1	-	-
21.	SPP	-	1	-	-
22.	KGST	-	1	-	-
23.	KKPA	-	1	1	400
24.	SPSA	-	1	1	250
25.	Sekolah Pelayaran	-	1	1	250
26.	Sekolah Farmasi	-	1	1	300
27.	SPMA	-	1	1	400

Sumber: Dari Mattulada dalam Koentjaraningrat (1989), berdasar catatan di Kantor Perwakilan Dep.P&K prop. SulSel, Makassar(1950-1965, termasuk Sulawesi Tenggara).

B A B I I I

PROSES BERDIRINYA UNIVERSITAS HASANUDDIN

III.1. Lembaga Pendidikan Tinggi di Makassar hingga 1965

Sejarah perguruan tinggi di Makassar telah di mulai sejak tahun 1947, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Putusan Letnan Gubernur Jenderal tertanggal 23 Juli 1947 yang menetapkan untuk mendirikan sebuah Fakultas Ekonomi di Makassar sebagai cabang dari Universitas Indonesia¹ di Jakarta sesuai dengan rencana desentralisasi perguruan tinggi di Indonesia yang merupakan pedoman pemerintah ketika itu.

Namun realisasi putusan tersebut dianggap mengambil waktu yang lama sedangkan kebutuhan akan guru-guru dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Ilmu Memegang Buku di sekolah-sekolah menengah di Indonesia sudah sangat mendesak, maka selanjutnya pada tanggal 1 September 1947 ditugaskan kepada Drs. L.A.H. Enthoven untuk mewujudkan suatu "*Leergang van de Opleiding van Lelaren M.O. Economie en Handelswetenschappen met beperkte bevoegdheid*".

Leergang ini dapat di buka pada tanggal 15 Januari 1948, dengan tenaga pengajar berjumlah 8 orang dan 16 orang mahasiswa yang semuanya berstatus ikatan dinas. *Leergang* ini dipimpin sendiri oleh Drs. L.A.H. Enthoven. Berdirinya *Leergang* ini membuka peluang bagi berdirinya Fakultas Ekonomi di Makassar. Peluang itu semakin besar dengan diangkatnya Prof. Dr. J.J. Honrath menjadi gurubesar dalam mata pelajaran

¹ Catatan: Universitas Indonesia (UI) Jakarta berdiri tanggal 2 Februari 1950 yang berasal dari Universiteit van Indoneise yang didirikan NICA tahun 1947. Pada tahun 1950, pemerintah RIS beserta pengajar dari Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia mengambil alih universitas tersebut. Sejak itu terjadi proses Indonesiasi yang mulanya memakai bahasa pengantar Bahasa Belanda diubah menjadi bahasa Indonesia.

menjabat dekan. Selanjutnya beliau diberi tugas oleh pemerintah pusat untuk mewujudkan Fakultas Ekonomi di Makassar.

Usaha itu akhirnya dapat terwujud pada tanggal 8 Oktober 1948, bertempat di Baraya sebuah kompleks bangunan yang dibeli pemerintah dari seorang Mayor Tieng Hoa. Pada saat berdirinya fakultas ini memiliki 11 orang dosen dan 36 orang mahasiswa yang sebagian besar berasal dari Leergang. Para pengajar pada fakultas ini di dukung oleh 4 orang gurubesar yaitu: Prof. Dr. J.J. Honrath sendiri, Prof. Mr. Dr. C. de Heer, Prof. Dr. Ph. Winkelman, dan Prof. Dr. J.D.N. Verluys.² Keempatnya merupakan gurubesar tetap pada fakultas ini.

Hingga oktober 1949, jumlah mahasiswa meningkat menjadi 77 orang dan ketika itu pula 8 orang mahasiswa telah menempuh ujian dengan hasil 7 orang lulus dan 1 ditolak. Dibawah asuhan para gurubesar tadi serta para pengajar, fakultas ini mengalami perkembangan yang baik hingga dalam bulan Maret 1950.

Seiring perkembangan situasi yang terjadi di tanah air, membawa pengaruh terhadap perkembangan fakultas Ekonomi di Makassar. Perundingan-perundingan di Den Haag dalam bulan Agustus sampai November 1949, melahirkan sistem pemerintahan baru, yaitu Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun bentuk pemerintahan federal ini tidak disenangi oleh pihak nasionalis dalam negara-negara buatan Belanda. Satu persatu mereka membubarkan diri dan masuk ke dalam Republik Indonesia. Pada bulan Agustus 1950 seluruh negara bagian telah bubar sehingga muncul kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

² Catatan: Prof. Mr. de Heer, gurubesar Ilmu Ekonomi Perusahaan.
Prof. Dr. Winkelman, gurubesar Sejarah Ekonomi.
Prof. Dr. Verluys, gurubesar Ilmu Ekonomi Tropis.

1950 seluruh negara bagian telah bubar sehingga muncul kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Situasi peralihan ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi keamanan di daerah. Persoalan-persoalan dekolonisasi masih terdapat di sana-sini seperti peristiwa APRA di Bandung, RMS di Ambon atau Peristiwa Andi Azis di Makassar. Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi membawa pengaruh bagi keadaan Fakultas Ekonomi di Makassar, keadaan ini mengakibatkan para pengajar yang sebagian besar orang asing dan Belanda, semuanya meninggalkan kota Makassar berhubung masalah keamanan di daerah ini semakin rawan dengan adanya penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia. Fakultas Ekonomi mulai mengalami kemunduran memasuki bulan April dan terus mundur sampai dibekukan oleh pemerintah Republik Indonesia pada bulan Oktober 1950.

Namun demikian dari 77 orang mahasiswa, diantaranya 16 orang sempat menghadakan ujian akte M.O. Memegang Buku dan Ilmu Dagang dengan hasil yang baik. Setelah itu riwayat Fakultas Ekonomi seakan telah berakhir.

Setelah Fakultas Ekonomi di Makassar dibekukan sebagian besar mahasiswanya pindah ke Jakarta melanjutkan studinya di Universitas Indonesia Jakarta. Para alumnus baik yang tamat di Makassar maupun di Jawa berinisiatif untuk menghidupkan kembali Fakultas Ekonomi di Makassar. Mereka mendesak pemerintah pusat di Jakarta untuk menghidupkan kembali Fakultas Ekonomi di Makassar dalam waktu yang singkat.

Inisiatif ini dipelopori diantaranya oleh; Nuruddin Syahadat, J. Dunga, Tutupoly, D. Ch. Toban, Lahunduitan dan lainnya. Usaha itu terus berkembang menjadi tiga

jurusan, setelah melihat kemungkinan yang tipis untuk menghidupkan kembali. Selanjutnya usaha tersebut dapat dilihat sebagai berikut;

Pertama oleh Nuruddin Sjahadat, Prof. Drs. G.J. Wolhoff dan Mr. Tjia Kok Tjiang bersama-sama mempersiapkan Fakultas Hukum swasta pada akhir tahun 1950, yang kemudian atas usaha ketiganya terwujudlah "Balai Perguruan Tinggi Sawerigading" dengan akte notaris tanggal 4 Desember 1950 No. 4 yang diketuai oleh Prof. Drs. G.J. Wolhoff, setelah ternyata tipis harapan untuk menghidupkan kembali Fakultas Ekonomi di Makassar. Kedua, bersamaan dengan usaha diatas pada bulan Maret 1951 terbentuklah "Panitia Perjuangan Universitas Negeri" untuk Makassar, yang dipelopori oleh J.E. Tatengkeng. Demikian pula usaha ke Tiga dengan terbentuknya "Panitia Penyelenggara Fakultas Ekonomi" yang dipelopori oleh J. Dungga dan Tutupoly. Dari ketiga badan ini merupakan kelak cikal-bakal dari berdirinya Universitas Hasanuddin.

Usaha untuk mendirikan pendidikan tinggi di daerah ini berjalan terus dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat di Makassar dengan pemerintah daerah dan masyarakat luas dilakukan pula dengan menarik perhatian pemerintah pusat. Usaha tersebut membawa hasil setelah Kementerian P.P. & K dan Universitas Indonesia menyepakati hasil "*Gentlemen Agreement*" dengan Yayasan Balai Perguruan Tinggi Sawerigading.

Menurut "*Gentlemen-Agreement*" tersebut, Kementerian P.P. & K. berjanji mewujudkan suatu Universitas yang lengkap berkedudukan di Makassar, dengan lebih dulu mewujudkan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat selanjutnya kemudian menghidupkan kembali Fakultas Ekonomi di Makassar serta mewujudkan pula sebuah Fakultas Kedokteran di Makassar, sebagai salah satu syarat yang mempunyai peluang

besar untuk dapat mendirikan suatu perguruan tinggi negeri di Makassar. Selanjutnya Yayasan Perguruan Tinggi Sawerigading akan melepaskan usahanya untuk mengembangkan fakultas swasta di Makassar seterusnya berkonsentrasi pada Kursus-Kursus B I yang akan disubsidi oleh Kementerian P.P. & K.

Pemerintah daerah saat itu yakni Gubernur Sulawesi, R. Soediro dan Walikota Besar Makassar, A. Dara Sjahrudin terus mendesak pemerintah pusat untuk mewujudkan hasil "*Gentlemen Agreement*" agar merealisasi pembentukan sebuah fakultas hukum dan fakultas kedokteran.

Akhirnya berkat kerjasama semua pihak baik pemerintah daerah maupun pusat bersama-sama dengan masyarakat dalam usaha realisasi pembangunan pendidikan tinggi di kota Makassar akhirnya membawa hasil yang menggembirakan. Hasil tersebut yakni:

1. Pada tanggal 3 Maret 1952 dengan berdasarkan Surat Putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 30 Januari 1952 No. 3399/Kab., diresmikan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Makassar sebagai cabang dari Universitas Indonesia di Jakarta. Pimpinan fakultas ini diserahkan kepada Prof. Mr. Dr. C. de Heer sebagai Dekan.³
2. Tanggal 4 Maret 1953 setahun setelah pembukaan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Ekonomi di buka kembali berdasarkan Surat Putusan Menteri P.P. & K. tanggal 22 September 1953 No. 53209/Kab. Sebagai cabang dari Universitas Indonesia setelah tiga tahun dibekukan. Jabatan pimpinan saat itu diserahkan kepada Prof. Mr. Dr. de Heer selain jabatannya pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.



3. Pada tanggal 1 Maret 1955 berdasarkan Surat Putusan Menteri P.P. & K tanggal 28 April 1955 No. 24511/Kab. Dibuka Perguruan Tinggi Pendidikan guru di Tondano yang dipimpin oleh Prof. Mr. G.M.A. Inkiriwang.
4. Terakhir dibukanya Fakultas Kedokteran di Makassar dengan Surat Putusan Menteri P.P. & K tanggal 27 April 1955 dengan pimpinan Prof. Ir. R. Soewandi.⁴

Memasuki tahun 1955, Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat dan Fakultas Ekonomi kembali mengalami kesulitan tenaga pengajar karena dua orang gurubesar yaitu Prof. Mr. Dr. C. de Heer dan Prof. Mr. Helein de Reid meninggalkan kota Makassar sehubungan habis masa kontraknya. Namun hal itu cepat diatasi dengan diangkatnya Prof. Drs. G.H.M. Riekerk menjadi pimpinan pada kedua fakultas itu.

Pada Tanggal 1 Juni 1956, pimpinan Fakultas Ekonomi selanjutnya diserahkan ke tangan Prof. Drs. G.J. Wolhoff. Pimpinan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat tetap di tangan Prof. Riekerk.

Sedangkan pimpinan fakultas Kedokteran selanjutnya diserahkan pada Prof. R. Soegiono Djuned Poesponegoro sebagai ketua dan Prof. Dr. S.J. Warouw selaku Sekertaris. Saat itu pula dicapai affiliasi fakultas ini dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta dan selanjutnya dengan Fakultas Teknik di Bandung.

Berdirinya ketiga fakultas dan perguruan tinggi ini maka kemungkinan akan terwujudnya keinginan masyarakat Makassar untuk membentuk sebuah universitas

³ Catatan: pemberian kuliah pada fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat ini telah di mulai sejak tanggal 11 February 1952, kecuali kuliah Ilmu Kebudayaan sebab tak ada dosen.

⁴ Sebelum berdirinya Fakultas Kedokteran, untuk merealisasikan fakultas ini mulanya dibentuk suatu badan yaitu "Panitia Persiapan Fakultas Kedokteran" yang diketuai oleh Sjamsuddin dg. Mangawing dan sebagai

negeri yang lengkap semakin besar. Dari uraian diatas dapat digambarkan besarnya minat dan hasrat masyarakat di daerah ini untuk turut serta dalam pembangunan khususnya di bidang pendidikan tinggi. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa perguruan tinggi adalah pusat lembaga ilmiah yang menghasilkan tenaga ahli atau sarjana yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan di segala bidang.

III. Sultan Hasanuddin dan Universitas Hasanuddin

Tanggapan pemerintah pusat sangat baik melihat keadaan ini, selubungan dengan hal itu maka Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Muhammad Yamin, mengeluarkan Surat Putusan tertanggal 11 Juni 1956/ No. 33696/S yang selanjutnya di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tanggal 8 September 1956, Lembaran Negara No. 39 Tahun 1956.

Pada tanggal 10 September 1956 dibuka dengan resmi sebuah universitas negeri oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta yang bernama "**Universitas Hasanuddin**". Universitas ini seperti mulanya memiliki empat fakultas: Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Universitas ini menempati lokasi di daerah Baraya, Makassar. Sebagai rektor pertama diangkat Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo sebagai Acting selain jabatan beliau sebagai rektor Universitas Airlangga di Surabaya.

Diambilnya nama Hasanuddin atau nama lengkapnya I Mallombasi Daeng Mattawang, Karaeng Bontomannape, Sultan Hasanuddin, Tumenanga ri Balla' pangkana, raja Gowa ke-XVI, yang memerintah Gowa dari tahun 1653 hingga 1669.

Sultan Hasanuddin merupakan putra dari Sultan Malikussaid yang lahir tanggal 1 Juni 1631. Meski pada mulanya pengangkatan I Mallombasi sebagai raja Gowa ke-XVI mendapat tantangan dari kaum bangsawan, disebabkan darah ibunya merupakan darah bangsawan kecil dan merupakan selir Raja Gowa ke-XV. Namun dukungan Mangkubumi Kerajaan Gowa, Karaeng Pattingalloang yang merupakan tokoh yang sangat disegani oleh kaum pembesar masyarakat Gowa dan kecakapan I Mallombasi mengendalikan pemerintahan akhirnya suara-suara itu mereda.

Dalam sejarah perlawanan terhadap kompeni Belanda, perlawanan Sultan Hasanuddin merupakan perlawanan yang terbesar terjadi di Sulawesi. Berbagai pertempuran yang terjadi menimbulkan korban yang sangat besar di berbagai pihak. Meski akhirnya perlawanan tersebut dapat di redam oleh pihak Kompeni Belanda, namun perlawanan ini diakui Belanda menimbulkan kerugian yang sangat besar. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan orang-orang Gowa ini begitu kerasnya sehingga Belanda menamakan mereka "Ayam Jantan dari Timur".

Selanjutnya Universitas Hasanuddin mengambil "Ayam Jantan" sebagai logo lambang universitas. Ayam Jantan, tegak di atas benteng kekukuhan tempat berpijak, membawa serta simbol-simbol kemauan keras, kebebasan berfikir, berjiwa besar untuk mencapai keseluruhan ilmu pengetahuan, kebahagiaan dan kesentosaan hidup dalam mengabdikan kepada kejayaan bangsa. Adapun arti dari unsur-unsur dalam lambang Universitas Hasanuddin⁵ ialah;

1. Ayam Jantan melambangkan sikap intelek yang berkembang berfikir, berjiwa besar dan militan dalam bergerak ke arah kemajuan.

2. Pohon Lontar, lambang ilmu pengetahuan serbagunaan manfaat yang diberikannya ke pada umat manusia, untuk kesejahteraan lahir-batin.
3. Benteng, mengingatkan kejayaan bahari tempat Unhas berdiri. Benteng Somba-Opu, Ujung Pandang, dan Tallo yang melindungi kota Makassar mendorong tekad yang patriotik dan dinamik untuk berjasa kepada tanah air.
4. Buah Padi dan Daun Kelapa, menggugah semangat untuk bekerja disertai prinsip hidup semakin berisi semakin merunduk dan keunggulan berdiri tegak menghadang badai dan taufan, seperti pohon kelapa yang menghiasi persada tanah air.
5. Harp atau kecapi, terukir ragam hias, mewakili kehidupan artistik Nusantara, untuk pembinaan seni-budaya dan keluhuran bangsa dan tanah air Indonesia.

Selanjutnya Universitas Hasanuddin sebagai lembaga pendidikan tinggi negara memikul kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu amanat luhur yang menjadi sasaran perjuangan nasional bangsa Indonesia. Menyiapkan tenaga yang berpendidikan tinggi serta cakap dalam memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan kehidupan masyarakat.

III. Unhas Lepas dari UI

Berdirinya Universitas Hasanuddin di Makassar tak lepas dari bantuan yang sangat besar dari Universitas Indonesia.⁶ Utamanya Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Fakultas Kedokteran Makassar, yang merupakan cikal-bakal dari Unhas.

Berdirinya Fakultas Ekonomi tahun 1947 sebagai cabang UI merupakan hasil keputusan Letnan Gubernur Jendral Hindia Belanda Nomor 127/23 Juli 1947. Fakultas ini mengalami berbagai rintangan dalam perjalanannya karena keadaan negeri saat itu yang kacau. Fakultas ini memisahkan diri dari UI tahun 1956.

Saat terjadinya pembekuan Fakultas Ekonomi di Makassar tahun 1950, banyak mahasiswa yang semula bergabung dalam Leergang pindah ke Jakarta meneruskan pendidikannya di Universitas Indonesia. Oleh Nuruddin Sjahadat, Prof. Drs. G.J. Wolhoff, Mr. Tjia Kok Tjiang, J.E. Tatengkeng dan kawan-kawan mendirikan Fakultas Hukum Swasta di bawah Balai Perguruan Tinggi Sawerigading. Mereka terus berupaya mendirikan sebuah universitas negeri di Makassar. Jalan pertama dengan mendirikan Fakultas hukum dan Pengetahuan Masyarakat cabang Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang resmi berdiri tanggal 3 maret 1952 dengan Dekan pertama yang juga sebagai Dekan Fakultas Hukum UI, Prof. Mr. Djokosoetono. Berkat kerja keras dibawah pimpinan Prof. Mr. C. de Heern dan Prof. Drs. G.H.M. Riekerk dalam jangka waktu empat tahun telah mampu memisahkan diri dari UI dengan keluarnya PP No. 23 / 1956 tanggal 10 September 1956.

⁶ catatan: Universitas Indonesia (UI) Jakarta berdiri tanggal 2 Februari 1950 berasal dari Universiteit van Indoneise yang didirikan NICA tahun 1947. Pada tahun 1950, pemerintah RIS beserta pengajar dari Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia mengambil alih universitas tersebut. Sejak itu terjadi proses Indonesiasi yang mulanya memakai pengantar Bahasa Belanda di ubah memakai bahasa Indonesia.

Demikian halnya dengan Fakultas Kedokteran Makassar yang merupakan hasil kerjasama antara UI dan yayasan Balai Perguruan Tinggi Sawerigading untuk membentuk Fakultas Kedokteran. Fakultas ini dapat terwujud setelah kerjasama antara pihak yayasan, Kementerian PP dan K serta Fakultas Kedokteran UI, dan berubah namanya menjadi Fakultas Kedokteran Unhas tanggal 10 September 1956.

Ketiga Fakultas yang menjadi cikal bakal Unhas ini, semuanya merupakan cabang dari UI pada mulanya dan seiring kemampuan mereka untuk berdiri sendiri, ketiga Fakultas tersebut resmi memisahkan diri bersamaan dengan diresmikannya Unhas tanggal 10 September 1956.

Fakultas Pertanian Unhas juga mendapat bantuan kerjasama dari fakultas Pertanian UI dan Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Melalui kerjasama tersebut pada tanggal 17 Agustus 1962, Fakultas Pertanian menjadi bagian dari Unhas.⁷

Sedangkan fakultas-fakultas lainnya merupakan bagian dari badan-badan pendidikan tinggi yang berdiri di Makassar seperti Fakultas Sastra dan Filsafat yang merupakan peleburan dari Kursus BI dari Yayasan Sawerigading. Demikian halnya dengan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik yang dulunya merupakan bagian dari Universitas 17 Agustus 1945 yang menjadi bagian dari Unhas tanggal 1 Februari 1961.

Demikianlah sejak berdirinya Unhas, berkat kerjasama dari berbagai pihak yang saling terkait, Unhas dapat berdiri sendiri mengurus rumah tangganya dan berdiri sejajar dengan daerah lain dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

⁷ Melalui kerjasama dengan IPB dan UI yang beranggotakan Prof. Dr. A. azis Ressang, dosen fakultas Kedokteran Hewan IPB dan Ir. Fachruddin, asisten ahli Fakultas Pertanian IPB dan tim UI. Lihat: Buku Pedoman Unhas 2001, Sekertaris Unhas, hlm. 6.

B A B IV

SEPULUH TAHUN PERTAMA UNIVERSITAS HASANUDDIN (1956-1965)

IV. 1. Struktur Kelembagaan

Struktur dan komposisi suatu lembaga menentukan perjalanan dari lembaga, dimana dapat dilihat perjalanan aktivitas serta penilaian terhadap lembaga tersebut. Karena suatu lembaga atau organisasi yang tidak jelas strukturnya maka segala tujuan dari padanya akan tidak berhasil dan menimbulkan kekacauan.

Mengenai struktur pimpinan pada Universitas Hasanuddin, sepanjang 1956-1965 mengalami penambahan dan pengurangan pada struktur organisasi. Ini menunjukkan adanya dinamika dari proses perjalanan Universitas Hasanuddin. Pergantian kepemimpinan dalam lingkungan Universitas Hasanuddin disebabkan berbagai hal diantaranya masa jabatan habis, pindah tugas, melanjutkan studi, pensiun atau meninggal dunia. Demikian dari berdirinya Universitas Hasanuddin tahun 1956 hingga tahun 1965, struktur organisasi terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:

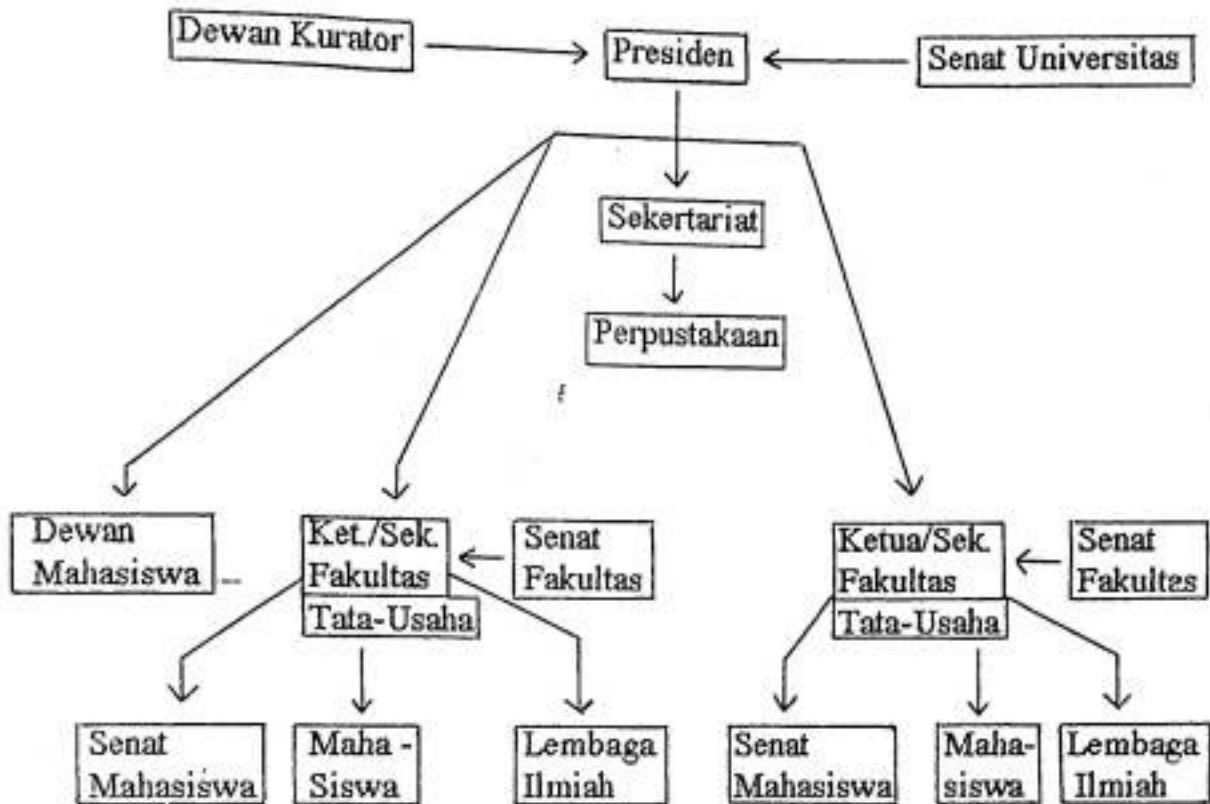
1. Presiden Universitas Hasanuddin, sebagai pimpinan tertinggi yang dipilih oleh Senat Universitas untuk menjalankan program universitas.¹
2. Senat Universitas, merupakan lembaga perwakilan para dosen yang anggotanya terdiri dari dosen bergelar Professor penuh dan dosen-dosen yang ditunjuk

¹ Kecuali dalam periode 1956-1965, pimpinan Universitas di pilih langsung oleh Presiden Republik Indonesia sehubungan berbagai keadaan yang menyebabkan hal tersebut. Pada periode Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo beliau diangkat langsung sebagai acting Presiden karena merupakan pimpinan perguruan tinggi negeri yang terdekat dengan Makassar, demikian pula penunjukkan Prof. Mr. KRMT. Djokomarsaid langsung oleh Presiden RI. Adapun penunjukkan Arnold Mononutu juga atas penunjukkan Tirtodiningrat langsung oleh Presiden RI sehubungan kapabilitas Oom No yang dibutuhkan dalam rangka kampanye langsung Presiden RI sehubungan pengembalian Irian Barat dan menjadikan Makassar sebagai basis terdepan untuk itu. Meski dalam biografi Oom No menyatakan itu hanyalah akal-akalan PKI yang ingin menjauhkannya dari Bung Karno (Nalenan: 1981:239).

mewakili fakultasnya masing-masing. Senat diantaranya memilih pimpinan Universitas dan memformulasikan kebijakan-kebijakan universitas.

3. Dewan Kurator atau Penyantun berfungsi sebagai dewan konsultasi yang akan memberikan pertimbangan kepada pimpinan universitas. Anggota-anggotanya terdiri dari para pejabat pemerintah, pejabat militer, pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat dan mantan-mantan pimpinan Universitas (Presiden/Rektor).
4. Sekertariat universitas, berfungsi menjalankan administrasi pada kantor pusat universitas.
5. Fakultas-Fakultas, mengorganisir dan menjalankan proses pendidikan dan melaksanakan proses pendidikan dan melaksanakan penelitian dan pengabdian menurut bidangnya masing-masing. Setiap fakultas dipimpin oleh Ketua atau Dekan.

Adapun susunan organisasi Universitas Hasanuddin 1956-1965 dapat digambarkan sebagai berikut:



Kecuali kelembagaan di Universitas Hasanuddin pada awal tahun 1956-1957 terdiri dari Presiden (istilah ini dipakai saat itu untuk rektor atau pimpinan universitas hingga tahun 1965) dan dibantu Wakil Presiden dan Sekretariat Universitas. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur lembaga pimpinan Universitas Hasanuddin 1956-1957 seperti dibawah ini:

- Presiden (Acting) : Prof Mr. A. G. Pringgodigdo
- Wakil Presiden (Acting) : Prof R. Soegiono D. Poesponegoro
- Sekertaris Senat : Prof Dr. Med. S.J. Warouw
- - Ketua Fakultas Ekonomi : Prof Drs. G.J. Wolhoff
- - Sekertaris : Drs. Mohammad Baga
- - Ketua Fakultas Hukum dan

- Pengetahuan Masyarakat : Prof Drs. G.M.A. Riekerk
- - Sekertaris : Mr. Thung Tian Piet
- - Ketua PTPG Tondano : Prof. Mr. G.M.A. Inkiriwang
- - Sekertaris : J.B. Inkiriwang
- - Ketua Fakultas Kedokteran : Prof R.S.D. Poesponegoro
- - Sekertaris : Prof Dr. Med. S.J. Warouw

- Dewan Kurator :
 1. Gubernur Prop. Sulawesi di Makassar
 2. Gubernur Prop. Maluku di Ambon
 3. Gubernur Prop. Irian Barat di Tidore
 4. Residen Koordinator Sul-Ut di Manado
 5. Inspektur/Kepala Jawatan Kesehatan Rakyat Prop. Sulawesi di Makassar
 6. Wali Kota Besar Makassar
 7. Ketua Pengadilan Tinggi di Makassar
 8. Kepala Polisi Prop. Sulawesi di Makassar
 9. Sjamsuddin Dg. Mangawing di Makassar.

Sebagaimana di sebutkan dia atas bahwa untuk sementara pimpinan Universitas Hasanuddin ketika berdiri untuk periode 1956-1957 diangkat Prof Mr. A.G. Pringgodigdo, selaku *Acting* Presiden Universitas Hasanuddin, disamping jabatannya

sebagai Presiden Universitas Airlangga di Surabaya. Mengenai pimpinan pada universitas baru ini diserahkan kepada seorang presiden universitas di Indonesia yang terdekat dengan kota Makassar, sambil menunggu Pemerintah dalam hal ini Kepala Negara Republik Indonesia mengangkat dan menetapkan seorang presiden pada Universitas Hasanuddin.

Berhubung jarak yang jauh saat itu demikian halnya dengan masih sulitnya transportasi dan komunikasi antara Surabaya dan Makassar, maka untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari pada universitas ini maka diangkatlah Prof. R. Soegiono Djuned Poesponegoro sebagai pimpinan yang menjabat Wakil Acting Presiden Universitas Hasanuddin selain jabatannya sebagai Ketua Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di Makassar.

Tak lama berselang pada pertengahan tahun kuliah 1956-1957, Presiden Republik Indonesia, Soekarno, mengangkat Prof. Mr. K.R.M.T. Djokomarsaid Tirtodiningrat menjadi Presiden Universitas Hasanuddin menggantikan Acting Presiden Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo terhitung mulai tanggal 1 Maret 1957 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal 28 Maret 1957 No. 107/M tahun 1957.

Selama tiga tahun mulai 1957 sampai pertengahan 1960, Prof. Mr. K.R.M.T. Djokomarsaid Tirtodiningrat menjabat Presiden Universitas Hasanuddin. Pada masa jabatan beliau terjadi perubahan susunan pimpinan Universitas dan pimpinan fakultas. Adapun susunan pimpinan Universitas Hasanuddin 1957-1960 adalah sebagai berikut:

- Presiden Unhäs : Prof. Mr. K.R.M.T. Djokomarsaid
Tirtodiningrat
- Sekertaris Senat Universitas : Prof. Mr. Teng Tjin Leng

- Sekertaris Universitas : Mr. R.G. Wirjono

- - Ketua Presidium Fak. Ekonomi : Prof. Dr. S.J. Warouw selanjutnya kepada
Prof. Drs. G.J. Wolhoff²
 - Sekertaris : Drs. Miendrowo Prawirodjumeno

- - Ketua Fak. Hukum dan Pengetahuan Masyarakat : Prof. Drs. G.H.M. Riekerk (1956-1958)
Prof. Mr. Soetan M. Sjah (1958-1959)
Prof. Dr. Ph. O.L. Tobing (1 September 1959).³
 - Sekertaris : Mr. P.H. Tan
Mr. Mustamin Dg Matutu⁴

- - Ketua Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : Prof. Mr. G.M.A. Inkiriwang (1958)
Drs. W.F. J.B. Tooy⁵

² Berdasarkan ketentuan Fakultas Ekonomi, peralihan pimpinan dari Prof. Drs. G.J. Wolhoff kepada sebuah Presidium yang di ketuai Prof. Dr. S.J. Warouw yang beranggotakan Drs. H. Kandou dan Drs. Miendrowo Prawirodjumeno. Presidium ini sukar bertahan sehubungan dengan kedudukan Prof. Dr. S.J. warouw sebagai pimpinan Fakultas kedokteran dan keberangkatan Drs. Miendrowo Prawirodjumeno untuk melanjutkan studi ke Amerika. Presidium baru kemudian diketuai Prof. Drs. G.J. Wolhoff dengan anggota Drs. Zainul Yasni dan Drs. Sarnsono (lih. Hlm. 35-36 Lustrum I UH 1956-1961).

³ Pimpinan Fakultas Hukum dan pengetahuan Masyarakat yang dijabat oleh Prof. Drs. G.H.M. Riekerk pada tanggal 1 September 1958, berhenti atas permintaan sendiri dan digantikan oleh Prof. Mr. Soetan Mohammad Sjah yang selanjutnya pada tanggal 1 September 1959 beralih lagi pada Prof. Dr. Ph. O.L. Tobing, gurubesar Antropologi Kebudayaan.

⁴ Mustamin Dg Matutu menggantikan PH Tan terhitung tanggal 1 Desember 1960.

⁵ Sebelumnya fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru yang diketuai oleh Prof. Mr. G.M.A. Inkiriwang yang berganti nama pada tahun kuliah 1958/1959. Digantinya Prof. Inkiriwang disebabkan oleh keterlibatan beliau dalam pergolakan Permesta di Sulawesi Utara beserta beberapa dosen dan mahasiswa (tidak terdapat data mengenai dosen dan mahasiswa, hanya di sebutkan beberapa tanpa penjelasan, pen), hal ini mengakibatkan lambatnya perkembangan jurusan ini. Atas inisiatif beberapa tanpa penjelasan, pen), hal ini mengakibatkan lambatnya perkembangan jurusan ini. Atas inisiatif Drs. W.F.J.B. Tooy, dosen pada fakultas ini memindahkan dari Tondano ke Manado, berkat bantuan pemerintah sipil dan militer setempat jurusan ini dapat dipertahankan keberadaannya meski tersendat-sendat. Berkat jasanya atas kelangsungan hidup jurusan pendidikan Keguruan ini, terhitung sejak tanggal 9

- - Ketua Fakultas Kedokteran : Prof. Dr. Med. S.J. Warouw.
- Sekertaris : Ir. Aminuddin Ressang
- Ir. J. Pongrekun⁶

Sedangkan pada susunan Dewan Kurator tidak terjadi perubahan dalam susunannya.

Selama hampir empat tahun dari 1957 sampai pertengahan 1960, Prof. Mr. K.R.M.T. Djokomarsaid Tirtodiningrat menjabat sebagai Presiden Universitas Hasanuddin. Pada pertengahan tahun kuliah 1959-1960, beliau mengundurkan diri dari jabatannya atas permintaan sendiri untuk dipindahkan sebagai Guru Besar Biasa (Tetap) pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya.

Sebagai penggantinya diangkatlah Arnold Mononutu, akrab disapa Oom No, terhitung mulai Februari 1960 berdasarkan Keputusan Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tertanggal 9 Februari 1960 No. 13368/C.III Oom No banyak berjasa dalam kepemimpinannya bagi pengembangan Universitas Hasanuddin. Tercatat enam fakultas baru terbentuk dalam masa kepemimpinan beliau dari tahun 1960 hingga 1965. Fakultas-fakultas tersebut yaitu:

1. Fakultas Teknik berdiri tanggal 10 September 1960.
2. Fakultas Sastra diresmikan tanggal 11 Desember 1960.⁷
3. Fakultas Sosial dan Ilmu Politik berdiri tanggal 1 Januari 1961.⁸
4. Fakultas Pertanian pada tanggal 17 Agustus 1962.
5. Fakultas IPPA diresmikan tanggal 17 Agustus 1962,

Oktober 1958 Tooy diangkat sebagai Acting Ketua. Berdasarkan Peperda di Manado pada tanggal 5 Mei 1960 ditetapkan berkedudukan di Manado.

⁶ Ir. Aminuddin Ressang berangkat ke Amerika untuk study dan digantikan oleh Ir. Pongrekun.

⁷ Berasal dari Fakultas sastra dan Filsafat Swasta Balai Perguruan Tinggi Ujung Pandang.

6. Fakultas peternakan berdiri tanggal 1 Mei 1964.

Pada periode ini pula FKIP Manado melepaskan diri tahun 1961, dan terbentuklah FKIP Makassar. Empat tahun kemudian FKIP Makassar melepaskan diri dari Unhas dan terbentuklah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Makassar pada tanggal 1 Mei 1964.

Di bawah ini susunan pimpinan pusat dan fakultas di Universitas Hasanuddin periode 1960-1965:

- Presiden Unhas : Arnold Mononutu
- Sekertaris : Mr. R.G. Wirjono
- - Ketua Presidium Fak. Ekonomi : Drs. Abd. Hafid
- - Sekertaris : Drs. S.E. Widodo
- - Anggota : Drs. H. Kandou
- : Drs. Faisal Sadaqah
- : Drs. Mohammad Saleh
- - Ketua Fak. Hukum dan Pengetahuan Masyarakat : Prof. Dr. Ph. O.L. Tobing (1961)
- : Prof. Mr. Soetan M. Sjah⁹
- - Sekertaris I : Mr. P.H. Tan
- - Sekertaris II : Drs. A.R. Lalisang
- - Ketua Fakultas Keguruan dan

⁸ Berasal dari Fakultas Tata-Praja Swasta Universitas 17 Agustus 1945 Makassar.

⁹ Pimpinan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Unhas terhitung tanggal 1 September 1959 dipegang Prof. Dr. Ph.O.L. Tobing. dalam tahun kuliah 1960-1961 selain sebagai pimpinan Fak. Hukum juga merangkap sebagai Ketua Fak. Sastra dan Filsafat yang dinegerikan tanggal 11 Desember 1960. Sehubungan pengangkatan baru tersebut maka terhitung tanggal 1 Januari 1961 beliau melepaskan jabatan pimpinan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat selanjutnya personalia pimpinan pada Fakultas ini mengalami perubahan pada tanggal 14 Agustus 1961 dengan bertempat di Kantor Fakultas diadakan sidang Presidium baru pimpinan Prof. Dr. Ph.O.L. Tobing dan Mr. Mustamin Dg. Matutu kepada sebuah timbangan terima dari pimpinan lama Prof. Dr. Ph.O.L. Tobing dan Mr. Mustamin Dg. Matutu kepada sebuah Presidium baru pimpinan Prof. Mr. Soetan M. Sjah.

- Ilmu Pendidikan : Drs. W.F.J.B. Tooy
- Sekertaris : Drs. J.L.S. Lelengboto
- - Ketua Presidium
- Fakultas Kedokteran : Prof. Prof. Dr. A.G.J. Kandouw (1959-1960)
- Dr. A. Ma'ruf¹⁰
- Anggota : Drs. Anwar Djamadin
- dr. R. Soehardjono Halida
- Sekertaris : Ir. J. Pongrekun
- - Ketua Presidium : Arnold Mononutu
- Wakil Ketua : Ir. J. Pongrekun
- Sekertaris : Mr. Soekanto (1 Juni 1961)¹¹
- Ir. Ramli Tjambari Saka
- Anggota : Ir. Andi Junde
- Ir. Abdul Madjid
- - Ketua Fakultas Sastra dan
- Filsafat : Prof. Dr. Ph. O.L. Tobing
- Sekertaris : Drs. Achmad Dahlan
- - Ketua Perguruan Tinggi
- Tata-Praja : Mr. Tjia Kok Tjiang
- Sekertaris : Mr. Soekanto¹²

¹⁰ Pada akhir tahun kuliah 1959-1960 pimpinan Fakultas beralih dari tangan Prof. Dr. Med. S.J. Warouw ke sebuah Presidium yang dipimpin Prof. Dr. A.G.J. Kandouw yang beranggotakan dr. D.P. Tahitu, Letkol. Dr. Abdullah, dr. Sri Hardono dan dr. M.M. Moeliono.

¹¹ Sehubungan pengangkatan Mr. Soekanto sebagai Sekertaris pada Perguruan Tinggi Tata-Praja maka jabatan Sekertaris diserahkan pada Ramli T. Saka.

¹² Pada tanggal 15 November 1962, Mr. Soekanto diangkat menjadi dekan dan Abdullah Annu sebagai Sekertaris.

- - Ketua Fakultas Pertanian : Prof. Dr. A. Azis Ressang
- Sekertaris : Ir. Fachruddin
- - Ketua Fakultas IPPA : Ir. Aminuddin Ressang
- - Ketua Fakultas Peternakan : Drh. Achmad Dahlan
- Sekertaris I : Drh. Muh. Gaus Siregar
- Sekertaris II : Andi Baso Ronda, B. Agr. Sc.
- Dewan Kurator :
 1. Gubernur Sulawesi dan Tenggara (Kol. A. Rifai).
 2. Presiden Universitas Hasanuddin
 3. Sjamsuddin Dg. Mangawing
 4. Hadji Andi Pattiwiri
 5. Andi Mattonrokang
 6. Andi Pangerang Petta Rani
 7. Ds. A.Z.R. Wenas
 8. Mr. R.G. Wirjono (Sekertaris bukan anggota).

Selain kesepuluh fakultas yang terdapat di Universitas Hasanuddin mempunyai sebuah perpustakaan yang disebut "Perpustakaan Universitas Hasanuddin" di Jalan Kandea Makassar yang menyediakan dan melayani kebutuhan civitas akademika Universitas Hasanuddin, kecuali pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berada di Manado, disebabkan jarak yang jauh dari Makassar.

IV.2. Perkembangan Fakultas dan Mahasiswa

Setelah mengalami ketertinggalan dalam perkembangan pendidikan, selanjutnya sektor tersebut menjadi perhatian dalam memajukan daerah. Meski di daerah-daerah masih kacau namun di kota Makassar terus diadakan rehabilitasi dan pembangunan pendidikan.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh segenap masyarakat yang peduli akan pembangunan pendidikan tinggi di daerah ini. Sebagian besar fakultas yang terdapat di Universitas Hasanuddin berdiri antara tahun 1960 hingga 1965, yakni pada masa kepemimpinan Arnold Mononutu. Terdapat penambahan enam fakultas yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Sastra dan Filsafat, Fakultas Sosial Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas IPPA, dan Fakultas Peternakan. Semuanya menjadi sembilan fakultas setelah FKIP Tondano memisahkan diri tahun 1961.

Dalam tahun kuliah 1957-1958,¹³ jumlah tenaga pengajar di lingkungan Unhas berjumlah 130 orang. Terdiri dari 95 orang dosen dan 35 orang asisten. Di dalamnya terdapat 28 dosen tetap dan 67 orang dosen tidak tetap. Dari 67 orang dosen tidak tetap ini terdapat 31 orang dosen yang datang memberikan kuliah dengan kapal terbang. Dosen terbang tersebut diantaranya 20 orang dari Jakarta, Bandung 9 orang dan Surabaya 2 orang.

Pada tahun kuliah itu juga, Unhas mendapat seorang tenaga pengajar dari Australia dalam rangka bantuan Unesco yaitu: Prof. R.J.H. Morris yang bertugas di Fakultas Kedokteran terhitung tanggal 1 Agustus 1957. Namun Prof. Morris hanya bertugas selama satu tahun kemudian kembali ke negaranya.



Dalam tahun kuliah 1956-1957, dosen dan asisten yang mengabdikan pada fakultas-fakultas di Unhas berjumlah sebagai berikut:

1. Fakultas Ekonomi	16 orang
2. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat	30 orang
3. Perguruan Tinggi Pendidikan Guru	38 orang
4. Fakultas Kedokteran	19 orang
<hr/>	
Jumlah	103 orang

Dalam tahun kuliah 1958-1959, tenaga pengajar di Unhas berjumlah 182 orang dosen tetap termasuk asisten.. sedangkan dosen luar-biasa antara lain berasal dari Universitas Indonesia, Universitas Airlangga dan Institut Teknologi Bandung. Melihat jumlah tersebut terdapat kenaikan jumlah tenaga pengajar di bandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun kuliah 1958-1959, terdapat kenaikan jumlah tenaga pengajar meski tidak terdapat catatan jumlah per fakultas namun jumlah pengajar dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Dosen Tetap pribumi	144 orang
2. Dosen Tetap asing	18 orang
3. Dosen Luar Biasa (tidak tetap) pribumi	79 orang
4. Dosen Luar Biasa asing	13 orang
<hr/>	
Jumlah	254 orang

Sedangkan pada tahun kuliah 1959-1960 jumlah tenaga pengajar adalah sebagai berikut:

1. Fakultas Ekonomi	45 orang
2. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat	29 orang

¹³ Lihat, Buku Lustrum I, hlm. 39

3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	94 orang
4. Fakultas Kedokteran	76 orang
<hr/> Jumlah	244 orang

Dari gambaran diatas terjadi penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Unhas kehilangan beberapa tenaga ahli yang banyak berjasa dalam pembinaan dan perkembangan Unhas, diantaranya adalah:

1. Prof. Mr. G.M.A. Inkiriwang yang terlibat Permesta di Sulawesi Utara.
2. Prof. R. Soegiono Djuned Poesponegoro meninggalkan Fakultas Kedokteran sehubungan pengangkatan beliau sebagai Kepala Biro Koordinasi Perguruan Tinggi.
3. Prof. Dr. J.A.W. Groenewegen, setelah tiga tahun di Fakultas Kedokteran meninggalkan Unhas tahun 1959.
4. Prof. Mr. Dr. Prajudi Atmosoedirdjo, meninggalkan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat sehubungan pengangkatan beliau sebagai Direktur Lembaga Admonistrasi Negara di Jakarta.
5. Prof. Dr. Helein de Reid kembali ke Amerika setelah habis masa kontraknya di Fakultas hukum dan Pengetahuan Masyarakat.

Walaupun diakui pada tahun kuliah 1958-1959 Unhas mendapat beberapa tenaga pengajar yang baru, namun penambahan dosen yang ada tidak seimbang dengan jumlah dosen yang meninggalkan Unhas.¹⁴

Telah di jelaskan sebelumnya, ketertinggalan Sulawesi selatan dalam bidang pendidikan terus diadakan rehabilitasi dan pembangunan pendidikan untuk kemajuan

¹⁴ selanjutnya mengenai perkembangan jumlah dosen dan mahasiswa terhitung tahun ajaran 1960-1965 tidak berhasil di dapatkan penulis, kecuali data mengenai perkembangan lulusan unhas hingga 1965 (pen.).

daerah oleh berbagai pihak. Berdasarkan data dalam Harvey (1989: 33), hingga tahun 1940-an anak-anak bangsawan dan pemuda Sulawesi Selatan tidak ada satu pun yang menempuh pendidikan tinggi, meski bersekolah di Makassar hingga pada pendidikan menengah.

Seiring berubahnya kondisi negara dan timbulnya kesadaran baru, bersamaan dengan hadirnya Unhas di Makassar, membawa pergerakan masyarakat berkembang cepat. Dalam lingkungan Unhas sendiri perkembangan jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun merefleksikan keadaan tersebut. Perkembangan jumlah mahasiswa Unhas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tahun 1957-1958 :

1. Fakultas Ekonomi	209 orang
2. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat	316 orang
3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	269 orang
4. Fakultas Kedokteran	226 orang
<hr/>	
Jumlah	1020 orang

Tahun 1958-1959:

1. Fakultas Ekonomi	249 orang
2. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat	165 orang
3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	348 orang
4. Fakultas kedokteran	215 orang
<hr/>	
Jumlah	1186 orang

Tahun 1959-1960 :

1. Fakultas Ekonomi	237 orang
2. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat	499 orang
3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	751 orang
4. Fakultas Kedokteran	313 orang
<hr/> Jumlah	<hr/> 1800 orang

Sedangkan jumlah alumni yang dihasilkan oleh Unhas dari tahun 1956 hingga 1965 digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1

Jumlah Alumni Universitas Hasanuddin 1960-1965¹⁵

Fakultas	1960	1961	1962	1963	1964	1965
1. Ekonomi	-	2	2	4	16	38
2. Hukum	5	3	11	4	19	16
3. Kedokteran	-	-	-	4	23	19
4. Teknik	-	-	-	-	-	-
5. Sastra	-	-	-	-	4	34
6. Sospol	-	-	-	22	27	9
7. Pertanian	-	-	-	-	-	-
8. IPPA	-	-	-	-	-	-
9. Peternakan	-	-	-	-	-	-

Sumber: Buku Pedoman Universitas Hasanuddin 1974-1975

Dari tahun 1956 hingga 1958, Unhas belum menghasilkan sarjana, karena masih dalam perjalanan studi di awal pertumbuhannya. Sarjana pertama yang dihasilkan oleh Unhas pada tahun ajaran 1958-1959 yaitu atas nama W. Silangan yang berhasil menyelesaikan sarjananya pada tanggal 4 Juni 1959 pada jurusan Psikologi pada Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pendidikan di Manado yang merupakan cabang Unhas.

Selanjutnya pada tahun ajaran 1959-1960 Unhas menghasilkan 5 orang Sarjana Hukum dengan gelar Mr. (*Meester in de Rechten*). Terdapat dua orang putra daerah pertama yang meraih sarjana di Unhas yaitu Mr. M. Natsir dan Mr. A. Zainal Abidin Farid. Selainnya terdapat dua orang Minahasa: Mr. J.V. Warouw dan Mr. F.X.J. Kalangi dan seorang Jawa yakni Mr. Thomas Brotosajogjo.

IV.3. Unhas dalam Kancah Politik Nasional

Salah satu sikap yang paling menonjol dari hampir setiap tokoh pemuda Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah perasaan nasionalisme yang tinggi diantara mereka. Menurut Hans Kohn (1955:11), Nasionalisme adalah paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara. Perasaan yang sangat mendalam diserahkan atau suatu ikatan yang erat akan tumpah darahnya. Nasionalisme dalam arti modern baru diakui sekitar abad 18. Nasionalisme memegang peran kuat membentuk semua segi kehidupan baik bersifat umum maupun pribadi. Adapun syarat universal dari nasionalisme adalah setiap bangsa harus membentuk suatu negara, negaranya sendiri, dan negara itu meliputi seluruh bangsa didalamnya.

¹⁵ Ket: Beberapa fakultas belum dapat menghasilkan sarjana selain Teknik baru menghasilkan tahun 1967, Fakultas Pertanian, IPPA dan Peternakan masih merupakan fakultas baru yang didirikan setelah 1962.

Salah satu tonggak penting yang dikenal dalam sejarah nasional bangsa Indonesia awal abad XX adalah Sumpah Pemuda, yaitu deklarasi atas kesatuan bangsa, tanah air dan bangsa, yang disusun dalam sebuah kongres organisasi-organisasi kepemudaan nasionalis di Jakarta sekitar akhir Oktober 1928.¹⁶ Kesadaran akan nasionalisme Indonesia telah terbentuk sejak suatu kesatuan politis radikal dari Perhimpunan Indonesia yang membentuk Partai Nasional Indonesia tahun 1927.

Berbagai pergerakan pemuda muncul dalam bentuk *Jong Java* (1915), *Jong Sumatranen Bond* (1917), *Jong Celebes* (1918), *Jong Minahasa* (1918), *Jong Bataks* (1925). Para pemuda dari keluarga berstatus tinggi dikirim ke Jawa untuk melanjutkan pendidikan. Menurut Benedict Anderson yang menjadi persamaan diantara pemuda-pemuda ini adalah pendidikan Belanda yang mereka miliki serta keterbukaan mereka terhadap norma-norma budaya Barat, di mana termasuk konsep kemandirian politik dan kebangsaan. Mereka berbicara dalam bahasa Belanda, selain bahasa daerah mereka, dan dalam beberapa kasus juga berbahasa Melayu. Selain itu mereka juga digiring oleh kesadaran awal nasionalisme atas identifikasi terhadap wilayah dan kampung halaman mereka. Secara politis, organisasi-organisasi kepemudaan ini bertujuan mengakhiri kekonservativan dari spektrum politis nasional. Menjadikan kesadaran umum terhadap bentuk modern organisasi dan cara baru dalam menempatkan tempat dan orang yang menjadi tanda akar sosial dan budaya dari nasionalisme.¹⁷

Tanpa melihat identitas kesukuan yang ada mereka merasa satu sebagai bangsa yang satu: Indonesia. Perasaan nasionalisme ini begitu kuatnya diantara para pemuda

¹⁶ Kajian kritis dari peristiwa Sumpah Pemuda dapat dilihat dalam: Keith Foulcher, *Sumpah Pemuda, Makna dan Proses Penciptaan Atas Sebuah Simbol Kebangsaan Indonesia*. 2000, Jakarta: Komunitas Barnbu.

¹⁷ Ibid.

yang merasakan akibat dari kolonialisme Belanda terhadap bangsanya. Meski tidak dipungkiri peranan kaum Etnika Hindia-Belanda yang merasa berutang budi terhadap kesengsaraan dan keterbelakangan bangsa Indonesia.

Dengan berdirinya Universitas Hasanuddin di Makassar, gambaran nasionalisme yang mendasari pergerakan pendidikan di Indonesia semakin nampak. Berbagai etnis terlibat langsung dalam pengembangan perguruan tinggi yang baru lahir ini, sementara berdasarkan fakta yang ada, tingkat pendidikan dan kepedulian masyarakat Sulawesi-Selatan hingga tahun 1940-1950 masih sangat rendah. Namun hal tersebut tidak mematahkan semangat pendidikan yang dibangun oleh kalangan tersebut. Terdapat empat etnis yang tampak mendominasi pertumbuhan awal Unhas hingga tahun 1965, yaitu: Minahasa, Jawa, Asing/Hindia-Belanda, dan Tionghoa (lihat lampiran mengenai etnis yang berjasa menggerakkan pendidikan di Makassar).

Masalah yang menjadi penghambat perkembangan pendidikan di Sulawesi Selatan yaitu masalah keamanan yang baru pulih tahun 1965. Pemberontakan Kahar Muzakkar dan gerakan-gerakan para *warlord* di pedalaman menimbulkan gejolak yang meresahkan dalam kehidupan masyarakat. Semua ini berpengaruh dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, sosial dan ekonomi terganggu. Anak-anak muda lebih senang menjadi tentara dibandingkan melanjutkan sekolah. Selain karena bangga dapat menjadi anggota dari pimpinan mereka, biasanya para pimpinan tentara atau *warlord* tersebut adalah orang yang dihormati di daerah mereka, juga dikarena kemudahan dan fasilitas yang mereka peroleh dengan menjadi tentara.¹⁸

¹⁸ Dari fakta tersebut, sebagian besar tokoh dari SulSel yang menempuh pendidikan di Jawa sebelum tahun 1950 memasuki dunia militer diantaranya: Kahar Muzakkar, Yusuf Amir, A. Mattalatta, Saleh Lahade, Andi Rifai, dan Andi Pangerang Pettarani (pen.). masalah ini pun telah dibahas secara mendalam oleh Harvey (1989) tentang gerakan Kahar Muzakkar.

Persaingan-persaingan militer yang mencakup berbagai aspek namun terutama dalam bidang ekonomi dan perluasan otonomi setempat merupakan inti gerakan di Sulawesi. Persaingan ini mencetuskan tantangan daerah terhadap wewenang pusat.¹⁹ Kehadiran semua kesatuan militer di Sulawesi Selatan telah membuat persoalan komando dan disiplin menjadi sangat kacau. Hal ini membuat keadaan daerah ini semakin rawan yang akhirnya mempengaruhi semua sendi kehidupan masyarakat daerah ini.

Selama revolusi nasional Indonesia tahun 1945-1949 Sulawesi Selatan menonjol karena menjadi tempat perlawanan terhadap kembalinya pemerintahan Belanda yang paling sengit di luar Republik dan bersama dengan itu menjadi pusat Negara Indonesia Timur (NIT)., sebuah negara yang paling berkembang di antara negara-negara federal yang di buat oleh Belanda. Untuk menegakkan pemerintahan NIT di Makassar, Belanda melancarkan pasifikasi militer dari Desember 1946 sampai Maret 1947, dilakukan secara sistematis oleh Kapten Westerling, mengakhiri secara efektif perlawanan bersenjata yang utama di Sulawesi Selatan. Masa ini merupakan bagian terkejam dan membawa penderitaan bagi kebanyakan penduduk Sulawesi Selatan selama masa revolusi.

Revolusi nasional di Sulawesi Selatan punya dua aspek yang berbeda yang oleh Harvey (dalam Audrey R. Kahin, ed.,1990:229) digolongkan sebagai boneka dan patriot. Perbedaan itu bersifat kronologis, kebanyakan rakyat di Sulawesi mulanya menolak kembalinya kekuasaan Belanda, hanya karena karena situasi saat itu mustahil dilakukan beberapa diantaranya setuju bekerjasama dengan Belanda. Sebagian lagi karena geografis, karena Belanda menguasai Makassar relatif cepat dan menempatkan markas besar pemerintahan dan militernya untuk Indonesia Timur di Makassar sedangkan di

¹⁹ Mengenai keadaan ini dijelaskan lebih jauh dalam kedua buku Barbara S. Harvey, *Permesta, Pemberontakan.....* (1989) dan *Pemberontakan Kahar Muzakkar.....*(1989)

pedalaman kaum gerilyawan bergerak terus setidaknya secara sporadis. Namun perbedaan boneka-patriot tidak dilihat secara dikotomi²⁰. Namun perbedaan ini antara pengalaman revolusi di Makassar dan di pedalaman banyak mendasari pergolakan yang melanda Sulawesi Selatan selama pemberontakan Kahar Muzakkar dari tahun 1950 sampai 1965.

Selain itu pembagian di Sulawesi Selatan meninggalkan sisa-sisa kebencian dan balas dendam. Sejumlah penguasa dan pejabat pro-Belanda dicopot dari jabatannya, beberapa di antaranya di bunuh, setelah pemulihan kedaulatan dan pembubaran NIT. Tahun-tahun penuh huru-hara di Sulawesi Selatan pada tahun 1950 sampai 1965, memberi banyak peluang untuk menyelesaikan hutang kehormatan atau balas dendam.

Munculnya Makassar sebagai ibukota NIT punya dua pengaruh terhadap kota ini yaitu: pertama, NIT mencakup semua daerah Indonesia Timur, maka para tokoh pejabat dan anggota parlemen datang dari seluruh bagian timur Indonesia. Ini menyebabkan Makassar menjadi kota kosmopolitan dan multietnis. Selain itu bagi orang Bugis-Makassar, kota ini menjadi kota kenangan sebagai simbol boneka Belanda selama masa revolusi di Sulawesi Selatan tahun 1945-1949.

Berbagai peristiwa yang terjadi di Sulawesi Selatan yang membawa pengaruh bagi kehidupan masyarakat di berbagai bidang utamanya di bidang keamanan dan ekonomi yang mempengaruhi pula masalah pendidikan masyarakat. Dalam usaha mengatasi keadaan tersebut hal; utama yang perlu dilakukan adalah mengendalikan keamanan.

²⁰ lebih jauh mengenai pembagian antara Boneka dan patriot dan berbagai peristiwa di dalamnya lihat Barbara S. Harvey dalam Audrey R. Kahin ed. (1991).

Peristiwa selanjutnya yang membawa pengaruh besar di Sulawesi adalah hubungan dengan pusat. Berbagai ketidakpuasan terhadap pembagian hasil daerah yang dilakukan serta sikap pusat kepada keputusan mengenai para tentara yang berpendidikan rendah. Ketidapuasan kalangan sipil dan militer telah terbentuk secara intensif di seluruh Indonesia sejak tahun 1955. Krisis ini kemudian meletus tahun 1957-1958. Di Sulawesi terkenal dengan Permesta. Peristiwa ini menyeret banyak tokoh Sulawesi di Minahasa dan Makassar. Dalam kasus Unhas, seorang tokoh yang banyak berjasa mengembangkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prof. Mr. G.M.A. Inkiriwang terlibat beserta beberapa dosen dan mahasiswa. Keadaan ini juga berpengaruh dengan perginya beberapa gurubesar yang berjasa dalam perkembangan Unhas dengan alasan keamanan yang tidak menentu.

Selama limabelas tahun pertama berdirinya Indonesia pasca-kolonialisme, Indonesia dihadapkan sejumlah pemberontakan yang menguji ketahanan negara ini. Dua pemberontakan yang paling penting yang dihadapi pemerintah yang terjadi di Sulawesi. Pemberontakan Kahar Muzakkar yang secara formal berkaitan dengan pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat dan Aceh pada masa itu yang menjadikan Sulawesi Selatan dan Tenggara terus bergolak dari 1950 hingga 1965. Kemudian Permesta yang berkaitan dengan pergolakan daerah tahun 1956 sampai 1961 yang dimulai di Sulawesi Selatan melebar ke Sumatera Selatan, meski akhirnya diperjuangkan di Sulawesi Utara. Sekali lagi keadaan tersebut membawa masyarakat kedalam situasi yang parah. Serta mempengaruhi perkembangan pendidikan tinggi di Makassar dan di Manado dalam lingkup Sulawesi.

Pemerintah kemudian menanggapi keadaan tersebut dengan melakukan operasi penumpasan. Ini dimaksudkan agar kondisi kehidupan rakyat yang memprihatinkan tidak berlarut-larut dan pembangunan dapat dilaksanakan. Selanjutnya mengatasi keadaan tersebut para tokoh masyarakat berusaha memulihkan kondisi masyarakat yang terus mengalami penderitaan dan tekanan yang tanpa henti. Gubernur Sulawesi periode 1956-1960, Andi Pangerang Petta Rani,²¹ menyadari bahwa kunci untuk memulihkan dan membangun daerah ini kembali selain merubah pola pikir masyarakat juga terletak pada pendidikan. Dalam biografi Oom No dikatakan selama masa kepemimpinannya banyak berjasa mengerahkan mahasiswa berpartisipasi dalam Operasi Kilat melawan Kahar Muzakkar.²²

Peristiwa penting yang turut mewarnai perjalanan Unhas adalah tepat pada tanggal 19 Desember 1961 setelah Agresi Militer Belanda ke Yogyakarta, Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora atau Tiga Komando Rakyat, yang ditindak lanjuti dengan penetapan susunan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat yang menetapkan kawasan Mandala : Sulawesi, Maluku dan Irian Barat.

Menurut Oom No, semula Mayjend. Soeharto mau menempatkan markasnya di Ambon dengan maksud supaya dekat dengan sasaran, namun oleh Oom No yang juga Rektor Unhas menyarankan agar ditempatkan di Makassar saja. Karena di Ambon susah beras, lapangan udara kecil dan masih banyak simpatisan Belanda, sebaliknya di Makassar semua tersedia. Di Makassar juga tersedia tenaga-tenaga muda terutama mahasiswa yang dapat dimanfaatkan oleh Komando Mandala. Karena Unhas berada di

²¹ Prof. Dr. Hamid Abdullah, Andi Pangerang Petta Rani, Profil Pimpinan yang Manunggal dengan Rakyat, 1991. Jakarta: Gramedia, hlm 100.

²² Oom No mendapatkan penghargaan berupa "Bayonet TNT" atas jasanya mendukung perampasan Serakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan (Nalenan:1981:245).

garis depan Trikora, maka Walawa bagi mahasiswa di Makassar dianggap penting dan diutamakan.²³

²³ *Ibid.* Hlm. 243.

B A B V

K E S I M P U L A N

Berdirinya Universitas Hasanuddin di Makassar sebagai lembaga pendidikan tinggi yang dilatarbelakangi oleh semangat nasionalisme yang bertujuan memajukan bangsa melalui bidang pendidikan. Berbagai etnis yang ada di tanah air berperan serta dalam proses pengembangan pendidikan di Sulawesi Selatan pada umumnya dan di Makassar pada khususnya, dimana saat itu masyarakat Sulawesi Selatan sendiri belum memandang pendidikan sebagai suatu hal yang penting bagi kemajuannya. Termasuk kaum bangsawannya sendiri.

Berbagai usaha sejak tahun 1947 hingga terbitnya Leergang yang menjadi cikal bakal pendidikan tinggi di Makassar dilakukan ditengah pasang-surut perjalanan sejarah Indonesia. Sejak masa pemerintahan kolonial Belanda berbagai diskriminasi yang dilakukan diberbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Hanya anak-anak kaum bangsawan yang bisa memasuki sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan bagi masyarakat umum, sekolah-sekolah yang disediakan hanyalah mengajarkan pendidikan dasar menulis, membaca dan berhitung.

Berbagai kejadian di Sulawesi Selatan tak lepas mempengaruhi jalannya pendidikan di daerah ini. Beralihnya pemerintahan dari RIS ke Negara Kesatuan Republik Indonesia sempat membuat pendidikan tinggi di daerah ini kolaps. Menyusul berbagai pergolakan diantaranya gerakan Kahar Muzakkar dan PERMESTA antara tahun 1940-1960 membuat daerah ini menjadi kawasan yang tidak aman. Keadaan ini tentu saja membuat berbagai bidang kegiatan yang terdapat dalam masyarakat menjadi terhambat.

Keadaan tersebut tidak membuat tokoh-tokoh yang terdiri dari berbagai etnis itu patah semangat. Berbagai usaha dilakukan untuk terus menjalankan pengembangan pendidikan, utamanya pendidikan tinggi di daerah ini terus diupayakan. Berbagai kerjasama dilakukan antara badan-badan pendidikan diantaranya dengan Yayasan Balai Perguruan Tinggi Sawerigading atau Yayasan Latimojong dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Usaha yang dilakukan berbagai pihak ini pada akhirnya membuahkan hasil berupa terwujudnya sebuah perguruan tinggi negeri yang menjadi cita-cita bersama, yaitu diresmikannya Universitas Hasanuddin di Makassar pada tanggal 10 September 1956. Pada saat berdirinya Universitas Hasanuddin hanya terdiri dari empat fakultas saja yakni: Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Tondano yang menjadi cabang dari Unhas serta Fakultas Kedokteran. Selanjutnya terus berkembang menjadi sepuluh fakultas dalam tempo satu dasawarsa pada masa kepemimpinan Arnold Mononutu sebagai rektor Unhas, yang menjadi batasan kajian penulisan ini.

Melihat perkembangan ini, Makassar yang dulu terbelakang dibanding berbagai daerah di Indonesia mulai mengejar ketertinggalannya. Kota Makassar, meski tertinggal hingga tahun 1940-an di bidang pendidikan, namun dikarenakan dulu merupakan tempat pembauran yang paling merata berbagai etnis dan merupakan kota yang memiliki keadaan administratif kolonial yang tersusun baik hingga akhirnya menjadi pusat berbagai gerakan nasionalisme pasca kolonial di Indonesia kawasan Timur.

Setelah berdirinya Universitas Hasanuddin lambat laun pendidikan di Makassar terus tumbuh dan menjadi indikator pertumbuhan pendidikan daerah ini. Putra-putra



daerah baik yang tamat di Jawa maupun dari Unhas sendiri terus bersama-sama membangun Unhas dan daerah Sulawesi Selatan. Tidak sampai sepuluh tahun anak-anak daerah ini telah mampu ikut dalam memajukan Unhas sebagai pimpinan atau pengajar.

Usaha yang telah dibangun para tokoh-tokoh penggerak pendidikan bersama-sama tokoh masyarakat daerah ini tidak sia-sia. Universitas Hasanuddin terus mengalami perkembangan utamanya perkembangan pendidikan tinggi dikalangan muda daerah ini.

Demikianlah peranan berbagai pihak tanpa memandang etnis dan mementingkan kemajuan nasional Indonesia, serta peranan mereka dalam pengembangan Unhas merupakan bagian yang sangat berharga dalam sejarah bangsa ini. Setidaknya menjadi pelajaran bagi masa kini di mana masalah perbedaan terus menjadi persoalan kita akhir-akhir ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, Drs., 1985, *Biografi Nasional Daerah Sulawesi Selatan*, Jakarta: Depdikbud (proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional).
- Abdullah, Hamid, Prof. Dr. ,1991, *Andi Pangerang Petta Rani, Profil Pimpinan yang Manunggal dengan Rakyat*, Jakarta: Gramedia.
- Alfian, 1992, *Pemikiran dan Perubahan Politik*, Jakarta : Gramedia
- Amal, Ichlasul, 1988, *Hubungan Pusat dan Daerah. Kasus Sumatra Barat dan Sulawesi Selatan 1949-1979*, Yogyakarta: PAU-SS UGM.
- Foulcher, Keith, *Sumpah Pemuda, Makna dan Proses Penciptaan atas Sebuah Simbol Kebangsaan Nasional*, Jakarta: Komunitas Bambu.
- Harvey, S. Barbara, 1989, *Permesta; Pemberontakan setengah Hati*, Jakarta: Graffiti.
- _____, 1989, *Pemberontakan Kahar Muzakkar, dari Tradisi ke DITII*, Jakarta: Graffiti.
- Kahin, Audrey, 1990, *Pergolakan Daerah, Pada Awal Kemerdekaan*, Jakarta: Graffiti.
- Kuntowijoyo, 1995, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang.
- Liddle, R. William, 1992, *Partisipasi dan Partai Politik, Indonesia Pada Awal Orde Baru*, Jakarta: Graffiti.
- MacAndrews, Colin dan Amal, Ichlasul, 1993, *Hubungan Pusat dan Daerah dalam Pembangunan*, Jakarta: Graffiti Press.
- MD, Sagimun, 1989, *Peranan Pemuda; dari Sumpah Pemuda sampai Proklamasi*. Jakarta: Binaakasara.
- Mattulada, tanpa tahun, *Latoa; Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, Jakarta: UI Press .

_____ 1997, *Sketsa Pemikiran tentang Kebudayaan, Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: UH Press.

Nalenan, R., 1981, *Arnold Mononutu, Potret Seorang Patriot*, Jakarta: Gunung Agung.

Sekretariat Unhas, 1974, *Buku Pedoman Universitas Hasanuddin 1974-1975*, Ujung Pandang: UH.

_____, 1976, *Katalog Universitas Hasanuddin 1976*, Ujung Pandang: UH.

_____, 1961, *Pengantar Ke Lustrum I Universitas Hasanuddin*, Makassar.